

**ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS
DUR) TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Musa Soim
(132211050)

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG 2018

Drs. H. Miftah AF., M.Ag.

Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang

Dr. H. Mashudi., M.Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt/Rw 05\1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Musa Soim

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Musa Soim

NIM : 132211050

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA**

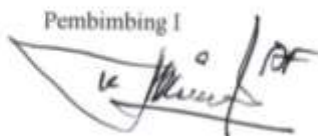
Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Desember 2017

Pembimbing II

Pembimbing I




Drs. H. Miftah AF., M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001

Dr. H. Mashudi., M. Ag.
NIP.19690121 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Il. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telpone/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Musa Soim

NIM : 132211050

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasah Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Ilmu Politik)

Judul Skripsi : **Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
tentang Partai Politik Islam di Indonesia**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

09-01-2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2018

Semarang, 17- 01- 2018

Ketua Sidang \ Penguji

Dr. Ja'far Bachaqi, M.H
NIP. 19730821200003 1002

Sekretaris Sidang \ Penguji

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Penguji II

Dr. Bekhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Drs. Miftah A.F., M.ag.
NIP. 195305151984031001

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa' ayat : 59)

PERSEMBAHAN

Bismillah...

Allah SWT

Orang Tuaku (Bapak Wasiri dan Ibu Siti Rohmatin)

Kakak dan Adikku (Umar Said dan Tri Soryani)

Sahabatku (Sholikin, Wahyu, Fandil, Ginjar, Haidar, Afan, SJ-B 2013
dan Posko 54 KKN UIN Walisongo)

Terimakasih sudah menjadi penyemangat disaat aku mulai lelah
sehingga

melupakan sejenak rasa capek saat melakukan pembuatan skripsi ini
(mudahkanlah jalan hidup mereka ya Allah) dan akhirnya skripsi ini
selesai

dengan pencapaian yang menurut penulis tidaklah mudah.

Terimakasih untuk kebaikan kalian semua yang tidak bisa penulis
sebutkan

satu persatu, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam
setiap langkah

kalian. Amiiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 7 Desember 2017

Deklarator

Musa Soim
MUSA SOIM
NIM. 13221050

ABSTRAK

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa munculnya gagasan politik Islam atau partai politik Islam sebagai dasar politik. Kepudaran ideologi Islam salah satunya disebabkan oleh kelemahan partai politik yang tidak sanggup menerjemahkan ideologi mereka dalam kehidupan politik nyata. Ideologi Islam sepertinya kurang atau bahkan “tidak” hadir untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan, ke-Indonesiaan, dan persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Ideologi Islam dalam prakteknya tidak diimbangi oleh performa partai-partai Islam dalam kinerja elektoral dan politik, performa partai-partai Islam seakan-akan “hilang” dalam kontestasi dan tatanan politik dalam menampilkan wajah politik yang lebih akrab dengan kepentingan politik umat Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah buku Ijtihad Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini bahwa partai politik Islam menurut Gus Dur adalah sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membeda-bedakan asal-usul, suku, ras, golongan, dan agama. Dan sebagai aspirasi rakyat untuk mewujudkan hak-hak sipil dan politik rakyat. Juga sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara. Dampak pemikiran politik Gus Dur bagi partai politik Islam sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia. Sosoknya yang penuh kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalah pahami oleh banyak kalangan dan kecenderungan bersifat sembarangan tidak teliti dan sering tampak ceroboh dalam membuat pernyataan di depan umum. Sedangkan dampak positifnya, Gus Dur mengajarkan pluralisme beragama sebagai suatu yang harus ditoleransi. Menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Masa depan perpolitikan di Indonesia menurut Gus Dur sangat tergantung pada

moralitas pribadi para politisi Indonesia itu sendiri. Pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islaman di dalamnya. Pengalaman sejarah politik semakin mengukuhkan satu ideologi nasionalisme dan Islam adalah dua ideologi besar dalam sejarah politik Indonesia yang tidak akan pernah pudar. Nasionalisme dan Islam akan tetap bersanding dan terus bertanding sebagai ideologi politik masyarakat Indonesia dalam mendirikan partai-partai politik. Peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauh mana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci: *Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Politik Islam, Partai Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Drs. H. Miftaf AF., M.Ag. selaku pembimbing I, serta Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing disela waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan

motivasi serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akhirat.

5. Kepada Bapak Dr. H. Tholkhahtur Khoir, M.Ag. Selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu tercurah.
8. Sahabat-sahabatku Sholikin, Wahyu, Fandil, Ginjar, Haidar, Afan, Lutfi dan Posko 54 KKN UIN Walisongo
9. Teman-Teman Satu Angkatan 2013 khususnya Jurusan SJB, dan lainnya.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin yarobbal alamin

Semarang, 07 Desember 2017
Penulis,

MUSA SOIM
NIM: 132211050

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK ISLAM

- A. Pengertian Politik Islam..... 25
- B. Pengertian Partai Politik Islam 34
- C. Tujuan dan Landasan Partai Politik Islam 42
- D. Relasi Agama dan Negara..... 49

BAB III PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG POLITIK ISLAM

- A. Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 64
- B. Corak Pemikiran dan Karya-Karya..... 75
- C. Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang
Politik Islam 84

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM

- A. Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
tentang Partai Politik Islam di-Indonesia..... 93
- B. Analisis Dampak Pemikiran Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) tentang Politik Islam Terhadap Masa
Depan Perpolitikan di Indonesia..... 102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 121
- B. Saran-Saran..... 124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman penjajahan, terlebih-lebih lagi setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia selalu menekankan pada persatuan dan kesatuan. Itulah sebabnya, pokok pikiran pertama yang terkandung dalam UUD 1945 adalah “Persatuan dan Kesatuan”. UUD 1945 pun sarat dengan faktor-faktor pemersatu atau integrasi, yang kemudian terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh MPR dalam ketetapan-ketetapannya. Usaha untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional harus dilakukan secara terus-menerus dan sekali-kali tidak boleh dianggap sebagai tugas yang telah selesai.¹

Menjelang berdirinya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun modernis, yang berada dalam BPUPKI berjuang agar Islam dijadikan dasar negara di Indonesia. Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang di dalamnya mengandung berbagai agama. Perjuangan nyata umat Islam adalah dengan mengemukakan kata syari’at Islam dalam

¹ Muslim Mufti., *Kekuatan Politik di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. Hal.76.

dasar negara. Dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, ternyata hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik Islam.²

Indonesia merupakan bangsa religius yang memiliki komposisi yang sangat beragam. Komposisi itu meliputi ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, aliran politik, ekonomi, budaya dan ideologi. Jika dijabarkan lebih rinci, terutama dalam masalah keberagaman, bangsa Indonesia pada dasarnya mempunyai watak, varian dan loyalitas keberagaman yang plural yang diakui oleh Pancasila dan UUD 1945.³

Kondisi politik di Indonesia sejak awal Orde Baru sampai dengan saat ini tergolong relatif stabil, jika di lihat dari dimensi pertahanan dan keamanan. Dari aspek aspirasi umat Islam, terdapat suatu kondisi yang variatif. Kondisi tersebut dapat di lihat pada pola hubungan antara Islam dan Negara selama Orde Baru.⁴

² Heni Wahyu Widayati, *Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan*, Jurnal Dakwah, Vol, X No. 2, Juli-Desember, 2009, hal 215.

³ Analisis Jurnal Studi Ke-Islaman. *Islam, Negara dan Hak-hak Minoritas di Indonesia*. ISSN: 2008-9046. Volume XII, Nomor 1, Juni 2012. Diterbitkan: IAIN Raden Intan Lampung. 2012. Hal 50

⁴ Hartono Hardjono, *Politik di Indonesia (1996-2003)*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996. Hal.,v

Reformasi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia memiliki implikasi sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat luar biasa. Tumbanganya Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, telah membuka ruang kehidupan sosial politik yang lebih terbuka dan bebas berbagai dimensi kehidupan sosial politik yang semula sangat terbatas, represif dan otoriter, menjadi lebih demokratis. Masyarakat menjadi lebih mudah mengekspresikan pemikiran dan kehendaknya dalam kehidupan sosial politik. Meskipun sikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintah dan negara, merupakan sesuatu yang langka di zaman Orde Baru karena dilarang dan dianggap subversif. Kebebasan warga negara untuk berkumpul, berorganisasi dan berserikat dalam rangka untuk memajukan tujuan sebelumnya lebih terjamin pada masa reformasi.⁵

Reformasi politik telah mengantarkan negeri ini dalam iklim dan sistem politik yang demokratis, yaitu setiap partai politik memiliki kebebasan yang sama dalam berpartisipasi, berkompetisi untuk mempengaruhi, dan bahkan berebut kekuasaan. Hal ini sesuai dengan tujuan partai politik, yaitu menguasai kekuasaan pemerintahan dan memperoleh dukungan

⁵ *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Jurnal Dimas diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IAIN Walisongo Semarang, Dimas Vol. 12 No. 1 Tahun 2012. Hal 1-2

rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁶

Islam masuk ke-Indonesia melalui jalan damai. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa penduduk Nusantara memeluk Islam melalui jalan paksaan atau perang. Adanya tuduhan dari sementara kaum orientalis bahwa Islam disebarkan ke Indonesia dengan perang, selain tidak didasari bukti-bukti sejarah, tampak lebih diwarnai oleh adanya rasa kebencian kalangan Barat terhadap Islam yang sengaja ditanamkan sebagai akibat Perang Salib yang pernah mereka korbankan ketika melawan Islam di Eropa.⁷

Allah juga menempatkan manusia sebagai hamba-Nya, untuk mengemban tugas sebagai Khalifah (Pengganti) di muka bumi, untuk memakmurkan dan tidak membuat kerusakan.⁸ Sebagai mana firmanNya dalam surat Al-Baqarah. Ayat 30 sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, hal 242

⁷ Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. Hal. 5

⁸ Ahmad Rofiq., *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015. Hal 31

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِىْهَا مَنْ
 يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا
 لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٥﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*

Menurut Ibn Rabi, dasar dari legitimasi keistimewaan hak-hak khalifah atas rakyatnya adalah surah al-An'am (6) ayat 165 yang artinya: *Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi ini, dan Dia (Allah) pula meninggikan sebagian kalian atas sebagian lainnya beberapa derajat.* Kemudian surat an-Nisa (4) ayat 59 yang artinya sebagai berikut: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian.* Menurut Ibn Rabi, kedua ayat ini merupakan penegasan bahwa Allah telah memberikan hak-hak istimewa kepada khalifah dengan segala kekuatannya dan memperkuat kedudukan mereka di bumi. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan

kepada para ulama atau cendikiawan Muslim untuk menghormati, mengagungkan, dan menaati perintah mereka.⁹

Partai politik Islam dapat diuraikan berbagai kemungkinan masa depan Islam politik di Indonesia, sesungguhnya perlu dipersoalkan dan sekaligus memperhatikan kondisi realitas yang berkembang dalam tradisi Islam politik di Indonesia. Kehadiran Islam politik tampaknya tidak pernah lepas dari konteks yang terjadi dalam sebuah negara. Model Islam politik karena itu akan kurang relevan jika tidak memperhatikan kondisi yang berkembang dan terjadi dalam sebuah negara. Iran misalnya menjadi negara Islam karena memang secara sosiologis masyarakatnya lebih cocok jika dipimpin oleh seorang kepala negara (Presiden) yang memiliki kriteria seorang Mullah atau sekurang-kurangnya berkemampuan keagamaan (keislaman) di atas rata-rata. Jika pun Presiden Iran bukanlah seorang Mullah¹⁰ maka penasehat presiden adalah para ahli Islam sehingga para Mullah menempati posisi penting di Republik Islam Iran.¹¹

⁹ Abdul Manan, . *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana, 2016. Hal, 19-20

¹⁰ Mullah adalah salah suatu gelar yang biasa diberikan kepada seorang ulama agama Islam. Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab *mawla* atau *maula*, yang dapat berarti “pemimpin atau pelindung”

¹¹ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Hal 285

Memahami pemikiran politik Gus Dur dengan sebagian memahami dari dinamika politik Indonesia itu sendiri. Sumbangan pemikirannya bukan saja pada keteguhannya membicarakan tema-tema sentral yang selalu menyertai perkembangan demokrasi, melainkan juga alternatif-alternatif jawaban yang disodorkan olehnya. Alternatif tersebut jelas bukan yang akan memuaskan semua pihak, tetapi yang penting adalah penemuan dataran-dataran baru yang memungkinkan terjadinya pergerakan-pergerakan yang lebih luwes dan berjangkauan jauh. Dengan cara seperti ini, pengembangan kehidupan politik dapat sekaligus menuju perbaikan, tetapi tanpa secara dogmatis¹² mengikuti sesuatu pola baku yang tertutup, sebegus apa pun itu telah dikembangkan.¹³

Gus Dur, seperti dikemukakan oleh Douglas E. Ramage, sebuah masyarakat Islam tidak perlu ada di negeri ini. Yang harus diperjuangkan oleh umat dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia di mana *“umat Islam yang kuat dalam pengertian*

¹² Dogmatis adalah sikap atau perilaku seseorang yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah

¹³ Muhammad A.S. Hikam. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid*. KOMPAS. Jakarta. Hal. 165.

berfungsi dengan baik” sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain.¹⁴

Sikap politik militan dan klaim-klaim kebenaran yang dilakukan kelompok-keompok garis keras memang tak jarang membuat mayoritas umat Islam, termasuk politisi oportunis, bingung berhadapan dengan mereka, karena penolakan kemudian akan dicap sebagai penentangan terhadap syariat Islam, padahal tidak demikian yang sebenarnya. Maka tidak heran jika banyak otoritas pemerintah dan partai-partai politik oportunis mau saja mengikuti dikte kelompok garis keras, misalnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Syariat yang kontitusional. Padahal, itu adalah “Perda *fiqh*” yang tidak lagi sepenuhnya membawa pesan dan ajaran syari’ah, dan muatannya bersifat intoleran dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak minoritas karena diturunkan dari pemahaman *fiqh* yang sempit dan terikat, di samping juga tidak merefleksikan esensi ajaran agama yang penuh spiritualitas, toleransi, dan kasih sayang kepada sesama manusia.¹⁵

Ringkasnya, para politisi oportunis yang berkerja sama dengan partai atau kelompok-kolompok garis keras sangat

¹⁴ Gerg Fealy. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LkiS, Yogyakarta, 1996. Hal. 206

¹⁵ Abdurrahman Wahid. *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: tha Wahid Institute, 2009. Hal, 34

berbahaya juga. Mereka ikut mejerumuskan negara kita ke arah jurang perpecahan dan kehancuran. Mereka tidak memperhatikan, dan bahkan mengorbankan, masa depan bangsa yang multi agama dan multi-etnik. Sepertinya mereka hanya mementingkan ambisi pribadi demi melanggengkan kekuasaan dan meraih kekayaan.¹⁶

Kepudaran ideologi Islam salah satunya disebabkan oleh kelemahan partai politik yang tidak sanggup menerjemahkan ideologi mereka dalam kehidupan politik nyata. Ideologi Islam sepertinya kurang atau bahkan “tidak” hadir untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan, ke-Indonesiaan, dan persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Ideologi Islam dalam prakteknya tidak diimbangi oleh performa partai-partai Islam dalam kinerja elektoral dan politik, performa partai-partai Islam seakan-akan “hilang” dalam kontestasi dan konstelasi politik dalam menampilkan wajah politik yang lebih akrab dengan kepentingan politik umat Islam.¹⁷

Partai-partai Islam yang dibentuk pada era reformasi ini begitu banyak, yang jumlahnya bisa jadi melebihi jumlah partai Islam pada era demokrasi parlementer. Tampak fregmentasi dan polarisasi begitu kental dalam pendirian partai-partai politik

¹⁶ *Ibid*, Hal 34

¹⁷ Moch. Nurhasim, *Masa Depan Partai Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. Hal ix

Islam. Hal ini karena baik dari kalangan Islam tradisional, modernis, dan bahkan dari kalangan sufi atau tarekat mendirikan juga partai politik. Dari kalangan tradisional, misalnya berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai SUNI dan Partai Kebangkitan Umat (PKU). Dari kalangan modernis, antara lain, muncul Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan PPI Masyumi sedangkan dari kalangan tarekat antara lain berdiri Partai Pengamal Tarekat Islam dan Partai Persatuan Tarekat Islam. Begitu juga dengan dasarnya, ada yang berasas Islam, Pancasila, dan gabungan antara Islam dan Pancasila.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, skripsi ini akan membahas permasalahan politik Islam dengan fokus pada pemikiran Abdurrahman Wahid tentang masa depan perpolitikan Islam di Indonesia yang kemudian penulis kemas dalam skripsi dengan judul “**Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Partai Politik Islam di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, Hal., 41-42

1. Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang partai politik Islam di-Indonesia.?
2. Bagaimana dampak pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang partai politik Islam terhadap masa depan perpolitikan di-Indonesia..?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian ini serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang partai politik di Indonesia
2. Memahami dampak pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang masa depan partai politik Islam di Indonesia

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Hukum Pidana dan Ilmu Politik.
2. Diharapkan tulisan ini dijadikan salah satu bahan studi banding bagi peneliti lainnya tentang Pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap Partai Politik Islam di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang membahasnya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hata (04511714) Fakultas Ushuludin Univrsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (*Orientasi Kiri Islam Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur)*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahwa Orientasi Kiri Islam Politik Gus Dur, adalah aspek keadilan sosial tanpa keluar dari garis kemanusiaan. Artinya ia menerima finalitas Pancasila dan keharusan demokrasi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia tanpa dibatasi oleh dinding-dinding agama, suku, ras, atau budaya. Dapat disimpulkan bahwa Gus Dur adalah seorang sekular Indonesia yang apresiatif terhadap demokrasi, dengan menggunakan basis keilmuan barat dan khazanah Islam klasik sebagaimana dalam gagasan Kiri Islam.¹⁹

Kedua, pada tahun 2003 Fitriyatus Soliha, Fakultas Syari'ah. Jurusan Siyasa Jinayah, menulis skripsi *Problem Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. Studi analisis atas kritik*

¹⁹ Nur Hata dengan judul, (*Orientasi Kiri Islam Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur)*). Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2009

Abdurrahman Wahid terhadap formalisasi hukum islam di Indonesia. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai keadaan hukum-hukum Islam di Indonesia dan bagaimana penerapannya, serta analisis dan kritik Abdurrahman Wahid terhadap keadaan hukum-hukum Islam di Indonesia.²⁰

Ketiga, pada tahun 2000, Khoirul Umam Muqim, Fakultas Syari'ah. Jurusan Siyasa Jinayah, menulis skripsi *Pemikiran Abdurrahman Wahid, respon Terhadap Politik Islam di Indonesia.* Dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran dan pendapat dari Abdurrahman Wahid terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia.²¹

Keempat, tahun 1996, Hafidh Yahya, Fakultas Ushuludin, Jurusan Aqidah Filsafat, menulis skripsi dengan judul *Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Bidang Agama dan Politik.* Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang

²⁰ Fitriyatus Soliha, menulis skripsi *Problem Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. Studi analisis atas kritik Abdurrahman Wahid terhadap formalisasi hukum islam di Indonesia.* Fakultas Syari'ah. Jurusan Siyasa Jinayah. Tahun 2003

²¹ Khoirul Umam Muqim, dengan menulis skripsi *Pemikiran Abdurrahman Wahid, respon Terhadap Politik Islam di Indonesia.* Fakultas Syari'ah. Jurusan Siyasa Jinayah, tahun 2000

pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai agama dan politik di Indonesia.²²

Kelima, pada tahun 2009, Muhammad Nasrul Fani, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ilmu Hukum Islam, menulis skripsi dengan judul *Pemikiran Politik Islam Studi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Majid*. Dalam skripsi tersebut memberikan wajah baru Islam yang melahirkan pemikiran pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid dan neo-modernisme Islam Nurcholis Majid secara tidak langsung telah mewarnai politik Islam di Indonesia, dengan ,pengawal Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjembatani ketegangan politik, ketika fundamentalisme agama akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Nurcholis Majid melihat bahwa kemunculan partai politik Islam di Indonesia yang plural akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia.²³

Keenam, pada tahun 2015, Hamsah Hasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dengan skripsi” *Hubungan Islam dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*”. Peneliti ini bertujuan untuk

²² Hafidh Yahya, menulis skripsi dengan judul *Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Bidang Agama dan Politik*. Fakultas Ushuludin, Jurusan Aqidah Filsafat, tahun 1996

²³ Muhammad Nasrul Fani, menulis skripsi dengan judul *Pemikiran Politik Islam Studi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Majid*. Fakultas Syari'ah, Jurusan Ilmu Hukum Islam, tahun 2009

mendiskusikan kembali isu tentang hubungan Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkritisi perkembangan serta pasang-surut hubungan Islam dan negara yang sangat dinamis mewarnai peta perpolitikan di Indonesia yang kental dengan tradisi Islam. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia.²⁴

Ketujuh, pada tahun 2017. Lisna Alvia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dengan skripsi "*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009*". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah pokok pada penelitian pengaruh Gus Dur mengenai penguatan ideologi pancasila, menata hubungan agama dan politik serta orientasi dan praktek politik pada PKB, dari awal didirikan PKB sampai Gus Dur wafat. Dan bertujuan untuk

²⁴ Hamsah Hasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dengan skripsi "*Hubungan Islam dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*". Fakultas Syari'ah. 2015.

mengetahui seberapa besar peran Gus Dur, dalam kekuatan dan pengaruh partai politik PKB dari tahun 1998-2009.²⁵

Kedelapan. Analisis Jurnal Studi Ke-Islaman. *Islam, Negara dan Hak-hak Minoritas di Indonesia*. ISSN: 2008-9046. Volume XII, Nomor 1, Juni 2012. Diterbitkan: IAIN Raden Intan Lampung. Indonesia merupakan bangsa religius yang memiliki komposisi yang sangat beragam. Komposisi itu meliputi ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, aliran politik, ekonomi, budaya dan ideologi. Jika dijabarkan lebih rinci, terutama dalam masalah keberagaman, bangsa Indonesia pada dasarnya mempunyai watak, varian dan loyalitas keberagaman yang plural yang diakui oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kesembilan, Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, Jurnal Dimas diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IAIN Walisongo Semarang, Dimas Vol. 12 No. 1 Tahun 2012. Reformasi politik telah mengantarkan negeri ini dalam iklim dan sistem politik yang demokratis, yaitu setiap partai politik memiliki kebebasan yang sama dalam berpartisipasi, berkompetisi untuk mempengaruhi, dan bahkan berebut kekuasaan. Hal ini sesuai

²⁵ Lisna Alvia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dengan skripsi ”*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009*”.

dengan tujuan partai politik, yaitu menguasai kekuasaan pemerintahan dan memperoleh dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Kesepuluh, Greg Barton, biografi Gus Dur. Judul Asli: *The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid. Terj, Lie Hua* (2002), membahas tentang perjalanan hidup Gus Dur dari semasa kecilnya dan perlawanannya atas rezim Orde Baru (Orba) serta menjelaskan pula tentang kebijakan selama membawa negara Republik Indonesia. Buku biografi yang ditulisnya, Greg Barton sendiri mempunyai ikatan yang dekat dengan Gus Dur, sehingga terkesan tidak obyektif. Akan tetapi, inilah yang menarik sosok Gus Dur dalam Biografi yang ditukis oleh Greg Barton.²⁶

Beberapa skripsi-skripsi tersebut, terdapat pembeda tentang pembahasan penulisan skripsi yang secara khusus membahas tentang Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Partai Politik Islam di Indonesia. Dengan Analisis Dampak Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang masa depan Perpolitikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa peneliti ini bukan sekedar duplikasi atau pengulangan dari peneliti yang sudah ada.

²⁶ Greg Barton, biografi Gus Dur. Judul Asli: *The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid. Terj, Lie Hua*. Tahun 2002

E. Kerangka Teori

Secara sederhana, politik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana beberapa atau banyak kelompok membuat keputusan-keputusan bersama. Ukuran kelompok tersebut sangat varian, mulai dari yang terkecil seperti dalam komunitas keluarga sampai yang paling besar yaitu komunitas Internasional.

Politik dalam bahasa Arab diwakili oleh kata *al-siyasah* yang artinya “mengurus atau pembimbingan” dan *daulah* artinya “negara”. Kata *siyasah* dijumpai dalam kajian bidang hukum, yaitu ketika berbicara masalah *imamah* sehingga dalam fiqh dikenal dengan adanya bahasan tentang *Fiqh Siyasah*. Demikian pula kata *daulah* pada mulanya dalam Al-Qur’an digunakan untuk penguasaan harta dikalangan orang-orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan-tangan orang yang kaya. Pada perkembangan selanjutnya, sejarah menggunakan kata *siyasah* dan kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan.²⁷

Ilmu fiqh memenuhi banyak porsi dalam hukum politik dan sosial sehingga dalam konteks ini masyhur dengan istilah fiqh politik (*al-fiqh al-siyasah*), dan dengan demikian terjalinalah

²⁷ Muslim Mufti., *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hal, 19

koneksi yang erat dengan inspiratif antara fiqh dan ilmu politik.

Imam Khomeini ra mengatakan:

“Pemerintahan dalam pandangan seorang mujtahid sejati merupakan filsafat praktis semua fiqh, pada semua lini kehidupan manusia. Pemerintahan adalah manifestasi aspek praktis fiqh dalam menyikapi probelm sosial, politik, militer, dan kultural. Fiqh adalah teori konkret dan sempurna bagi pengelolaan manusia dan masyarakat dari sejak di buaian ibu hingga berada di liang lahat.²⁸

Lebih lanjut, karena peneliti ini mengkaji masalah politik Islam maka penyusun mengkategorikannya dalam perspektif *Fiqh as-Siyasah* atau *as-Siyasah as-Syar'iyah*. Untuk mengkaji pemikiran politik Islam memang tidak lepas dari *Fiqh as-Siyasah* dan hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu hukum yang bersifat *Qath'i* (Syari'ah) dan yang bersifat *Zhanni* (fiqih), kerena politik seringkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi maka penulis memasukkan dalam kategori fiqih. Di mana *Fiqh as-Siyasah* mempunyai dimensi yang sangat luas dalam mengimplementasikan kehidupan bernegara seperti menjamin kemaslahatan secara umum (*Maslahah al-Mursalah*), keadilan dan kestabilan.²⁹

²⁸ Ali Ashghar Nusrati. *Sistem Politik Islam*. Jakarta:Nur Al-Huda, 2015, hal, 42

²⁹ K.H. Ibrahim Hoesen.”Fikih Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik”. *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.2 Vol. IV (1993), hal. 58. Lihat, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal, 15.

Menurut, pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa keberadaan kepala negara dibutuhkan umat Islam tidak hanya menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, tetapi juga untuk menjamin jalannya hukum-hukum Allah. Sebagai konsekuensi dari kekuasaan kepala negara yang sakral, baik Ibn Abi Rabi' maupun Ibn Taimiyyah mengharamkan umat Islam untuk melakukan pemberontakan terhadap kepala negara meskipun kafir, selama masih menjalankan keadilan dan tidak berbuat maksiat kepada Allah.³⁰

Menurut, Al-Mawardi pelembagaan imamah adalah *Fardlu Kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyiddin* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).

Menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib

³⁰ Muslim Mufti. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015. Hal. 125.

(*fardlu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay'* *amr bi wasa'illah* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Demikianlah sepintas gambaran mengenai pemikiran politik Islam yang nantinya diharapkan banyak membantu menyusun dalam membuat kerangka teoritis. Dari beberapa paparan singkat tentang teori di atas, penulis akan menjadikan teori tersebut sebagai analisa untuk melihat permasalahan pemikiran politik Islam Abdurrahman Wahid di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini baik yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan, karya-karya dan jurnal-jurnal. Karena ini studi tokoh maka ada dua metode pokok untuk memperoleh pemikiran tokoh tersebut. *Pertama*, penelitian

pikiran serta faktor yang melatarbelakangi K.H. Abdurrahman Wahid . *Kedua*, penelitian tentang biografinya sejak dari permulaan sampai akhir pemikiran lainnya.³¹

2. Sifat Penelitian

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini bersifat *deskriptif-analitik*. Yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid. Dengan kata lain karakter dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialah dasar-dasar pemikiran politik Abdurrahman Wahid di Indonesia. Adapun analitik di sini adalah analisis dalam pengertian historis, yakni meneliti sejarah yang melatarbelakangi gagasan pemikirannya, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada dasar-dasar pemikiran politik Islam di Indonesia.³²

3. Pendekatan

Berdasarkan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran itu merupakan

³¹ William Chang, *Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Erlangga, Hal 17

³² *Ibid.* hal 18

hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Berkaitan dengan penelitian ini sudah barang tentu, kondisi sosial politik dan kultur yang melatarbelakangi metode pemikiran Abdurrahman Wahid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data skripsi ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Obyek penelitian ini adalah Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid).

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini terbagi pada dua sumber: sumber primer dan sumber sekunder. Yang menjadi data-data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Abdurrahman Wahid, khususnya yang mengulas tentang politik Islam dan tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Sementara itu, buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, *website*, surat kabar yang berkaitan baik dengan kedua tokoh tersebut ataupun tulisan orang lain tentang politik Islam merupakan data sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab

permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang politik Islam, pengertian politik Islam, pengertian partai politik Islam, tujuan dan landasan politik Islam, relasi Agama dan negara.

BAB III Dalam bab ini membahas tentang biografi Gus Dur, corak pemikiran dan karya-karyanya, serta pemikiran Abdurrahman Wahid tentang politik Islam.

BAB IV Dalam bab ini membahas analisis mengenai bagaimana dampak pemikiran Abdurrahman Wahid tentang masa depan partai politik Islam di Indonesia.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam rangka menjawab permasalahan bagaimana yang telah dirumuskan bagian awal

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM

A. Pengertian Politik Islam

Politik dari bahasa Inggris, yakni *politics* berasal dari bahasa Yunani *Politicos* (menyangkut warga negara) *polites* (seorang warga negara) *polis* (kota, negara) *politeia* (kewargaan). Politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik berbeda dengan *political action*. Aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik, karena itu, aksi politik adalah tindakan yang diambil sebagai konsekuensi untuk menjalankan teori-teori politik. *Political aktion is reduction political theory*. Menurut Aristoteles merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah *Mahluk Polis* (Negara-Kota).¹

Kamus besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata politik sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap

¹ Lorens Bagus, “*Kamus Filsafat*”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal: 857

Negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau mengenai sesuatu masalah).²

Kata politik berasal dari bahasa Yunani *politicos*, yang berarti *dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga Negara*, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara. Pengertian ini merupakan penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.³

Kamus-kamus bahasa Arab juga memberikan berbagai macam arti untuk kata “*siyasat*” di antaranya ialah, melakukan sesuatu sesuai dengan kemaslahatan, pekerjaan “*sais*”, yang membina hewan-hewan, perbaikan mahluk dengan cara membimbing mereka menuju keselamatan dalam waktu dekat dan untuk hari kemudian, kecakapan memerintah dan mengelola urusan dalam dan luar negeri.⁴

Sedangkan, pengertian Islam ada dua yang dapat digunakan untuk memahami pengertian Islam, yaitu kebahasaan

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 687.

³ Ahmad Rofiq., *Politik hukum Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. Hal:15

⁴ *Ibid*, hal. 24

dan sisi keistilahan. Kedua sisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Islam dari sisi kebahasaan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *salama* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Kata *salama* kemudian diubah menjadi *aslama* yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Pengertian Islam yang demikian relevan dengan Qs: Al-Baqarah (2): 208

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*⁵

Dan relevan dengan Qs Al-Anfal (8): 61,


وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ هَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁶

⁵ Qs Al-Baqarah (2): 208,

⁶ Akhmad Taufik, *. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Hal. 37

Berdasarkan dari sisi istilah Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Islam adalah agama universal yang misinya adalah rahmat bagi semua penghuni alam sebagaimana firman-Nya dalam Qs Al-Anbiya (21): 107

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.*⁷

Universalitas Islam dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, meliputi prinsip ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesamanya dan lingkungan.⁸

Sejak khalifah dihancurkan dan sistem politik diterapkan di negeri kaum Muslimin, politik Islam tersingkir. Pada saat itulah masuk berbagai konsep pemikiran politik barat yang di tegaskan dalam ideologi kapitalisme, ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan yang harus dipahami oleh umat Islam bahwa politik Islam tidak dapat diterapkan tanpa tegaknya daulah

⁷ Qs Al-Anbiya (21): 107

⁸ *Ibid.* Hal, 38

khilafah, bahwa memisahkan politik Islam dari kehidupan dan agama berarti menghancurkan Islam, sistem, dan hukumnya, serta memusnahkan umat, nilai-nilai, peradaban, dan risalahnya.⁹ Secara *lughah*, politik (*siyasah*) berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang berarti mengurus kepentingan seseorang.

Berdasarkan menurut terminologi ulama, pengertian fiqh siyasah adalah sebagai berikut.

1. Menurut Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara' (Ahmad Fathi Bahantsi dalam *al-siyasah al-jinaiyyah fi al-syari'at al-islamiyah*).¹⁰
2. Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu Al-Qoyyim, fiqh siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan menghindari *mafsadah* (keburukan), meskipun Rosul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.¹¹
3. Menurut Abd. Wahab Al-Khallaf, siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemandaratan (bahaya) dengan tidak melampaui

⁹ Abdul Qodim Zulham, *Pemikiran Politik Islam*, Jawa Timur: Al-Izzah, 2001, hal. 1

¹⁰ *Ibid.*, hal. 2

¹¹ Abdul Qodim Zulham, *Op.cit.* Hal 2

batas dan pokok syariat yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. Maksud Abd. Wahab tentang masalah umum negara, antara lain pengaturan perundang-undangan negara, kebajikan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan, penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan urusan dalam negari.¹²

4. Menurut Abd. Al-Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kully*).¹³

Gilles Kepel dalam bukunya *Jihad: The Trail of Political Islam* mendefinisikan Islam politik sebagai gejala sosial politik di berbagai belahan dunia yang berkaitan dengan aktivis sekelompok individu Muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini bersama (*hastily assumed shared ideologi*).¹⁴ Dalam definisi ini, Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomenasosial-politik yang melibatkan sekelompok individu.

¹² Abdul Qodim Zulham., *Op.cit.* Hal 2

¹³ Abdul Qodim Zulham., *Op.cit.* Hal 2

¹⁴ Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam* (London: I.B. Tauris, 2002). Hal. 23.

Kalimat *Zoon politicon*, yang diintrodusir Aristoteles, seorang murid filosofis idealis tersohor Plato, yang ketika tahun 342 SM tinggal di istana Pella Macedonia menjadi guru dari putra raja Philippos yang sangat terkenal, Alexander Agung, sampai kini tidak ada seorang pun yang membantah. Manusia adalah makhluk sosial, yang hanya dapat berkembang dan meraih kebahagiaan, jika ia hidup dalam dan bersama masyarakat. Al-Farabi mengatakan bahwa, ” sesuai kodratnya, manusia tidak dilengkapi kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Jika seorang ingin mencapai kesempurnaan kodratnya, dia harus masuk menjadi anggota masyarakat (*qaum*) dan kerjasama dengan orang lain.¹⁵

Plato, filsuf Yunani yang banyak mengilhami praktik politik modern, lama abad sebelum masehi, telah membuat sebuah rumusan tentang keadilan (*justice*) dalam negara ideal (*ideal state*), yaitu negara yang menjungjung tinggi keadilan dan mampu mensejahterakan rakyatnya.¹⁶

Salah satu ciri negara ideal menurut Plato adalah negara yang mampu melayani kebutuhan dasar manusia dalam rangka membangun kualitas kemanusiaan. Oleh karena itu, Plato

¹⁵ Dikutip dari Majid Khadduri, *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Kuswanto, Tarawang Press, Yogyakarta, 2002, hal. 4.

¹⁶ Tamsil Linrung. *Politik Untuk Kemanusiaan Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 2014. Hal 20

mengklasifikasi pekerjaan menjadi tiga bidang, sebagai pengatur atau penguasa, tentara atau penjaga keamanan, dan para pekerja. Bagi Plato, semua manusia bersaudara. Namun, Tuhan telah mengatur sedemikian rupa sehingga ada orang yang cocok sebagai pengatur (pemerintahan atau abdi negara). Ada juga yang corok sebagai tentara dan sebagian pekerja (petani atau pedagang).¹⁷

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah,¹⁸ dengan kemampuan terbatas, sehingga untuk menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhannya manusia akan saling tergantung satu sama lain. Dengan jalan ini, Dia telah membuat semua manusia, secara hakiki, saling memerlukan dan cenderung berhubungan sesamanya. Dia telah meletakkan dasar kehidupan bersama dan bermasyarakat bukan sekedar hal biasa, dikehendaki ataupun terpaksa, tetapi juga alami.¹⁹ Dengan kata lain, secara faktual tidak ada manusia mampu hidup sendiri dalam waktu lama tanpa bantuan orang lain. Ketidakmampuan manusia ini, menurut Ibnu Khaldun, paling tidak karena dua alasan: *Pertama*, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok: *kedua*, ketidakmampuan pertahanan diri. Oleh karena itu, kebutuhan hidup bersama dan tolong menolong adalah kebutuhan pokok

¹⁷ *Ibid.* Hal. 21

¹⁸ Qs: An Nisa' 4 : ayat (28).

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Mizan, Bandung, 1992, hln. 19.

bagi manusia, apabila itu tidak dilakukannya, ia akan hancur.²⁰ Kecenderungan manusia untuk saling kerjasama dalam suasana aman dan damai disatu sisi dan ketidakmampuan manusia disisi lain pada gilirannya melahirkan kehidupan berkelompok, yang kemudian lazim disebut hidup bermasyarakat, yakni sama-sama tinggal dan menjadi penghuni sebuah kota atau kampung untuk hidup bersama dan saling memenuhi kebutuhan, karena dalam watak manusia itu telah terdapat kebutuhan untuk bekerja sama untuk kehidupan.²¹ Masyarakat, yang dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan didefinisikan sebagai "*any association of human being*"²² atau "sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapainya keinginan-keinginan mereka bersama", merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia sering dengan kebutuhan alami setiap manusia.

Sebagaimana, Plato dan Aristoteles, Farabi, berpendapat, di antara tiga macam masyarakat sempurna tersebut maka negara-kota merupakan sistem atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Beberapa pengamat sejarah ilmu politik Islam menganggap aneh pendapat Farabi itu, oleh karena pada waktu

²⁰ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 74-75.

²¹ *Ibid.*, hlm. 77.

²² C.F. Strong, *Modern Political Constitution to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidgwick&Jacson Limited, London 1996. Hlm. 4. Dilihat juga Ridwan HR.,H.,M.HUM. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007. Hlm. 3.

itu dia hidup pada zaman dikala Islam telah terbagi-bagi menjadi semacam negara-negara nasional, yang masing-masing terdiri dari banyak kota dan desa serta wilayah luas. Tetapi Farabi tidak seorang diri dalam hal ini. Aristoteles juga menganggap bahwa negara-kota merupakan kesatuan politik yang terbaik di Yunani meskipun waktu itu Yunani sudah menjadi daerah jajahan Macedonia, dan sistem negara-kota sudah tidak berfungsi lagi. Dalam waktu itu pendapat Farabi ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa dalam idealisasi pola politik dia tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan politik tempat dia hidup.²³

B. Pengertian Partai Politik Islam

Partai politik secara etimologis berasal dari kata partai dan politik. Kata “partai” berasal dari bahasa Inggris “*part*” yang berarti menunjuk kepada sebagian orang yang seases, sehaluan, dan setujuan terutama dibidang politik. Sedangkan politik yang dalam bahasa Inggris *politics* berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan, atau seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan.²⁴

Partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seideologi atau tempat atau wadah penyaringan dan pembulatan,

²³ Munawir Sjadzali,.. *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: UI-Pres, 1990. Hlm.52.

²⁴ BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal. 5

serta tempat berkumpulnya orang-orang yang seide, cita-cita dan kepentingan.²⁵

Partai politik Islam telah ada dan berkembang hingga saat ini. Dari sini dapat diketahui, bahwa lahirnya partai politik Islam di Indonesia menunjukkan kenyataan di mana dinamika politik di negeri ini salah satunya berorientasi aliran. Menurut Th. Sumartana, sebagaimana dikemukakan oleh Lili Romli, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berbasis agama. *Pertama*, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan keagamaan yang dipercayai. *Kedua*, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok.²⁶

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur²⁷ politik dalam negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:

²⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hal 209.

²⁶ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. Hal, 115-116

²⁷ Selain partai politik, infrastruktur politik terdiri dari organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, kelompok tokoh masyarakat, dan media (pers).

1. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²⁸
2. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).²⁹
3. Menurut Firmanzah menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan

²⁸ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori Konsep dan Strategi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. Hal., 11

²⁹ *Op.cit.*, Muhadam Labolo, Hal., 11

dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki struktur organisasi yang berjenjang (Pusat, Daerah, Cabang, Ranting) dan adanya pembagian divisi disetiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.³⁰

4. Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

³⁰ Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Hal., 66

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Umdang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan tentang partai politik sebagaimana dijelaskan dalam point-point di bawah ini:

1. Partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu sehingga mereka memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan melalui penguasaan struktur dan kekuasaan dalam pemerintahan.
2. Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, partai politik harus berkontestasi dalam arena demokrasi yang bernama pemilu.
3. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dijadikan media untuk mewujudkan kepentingan rakyat, yaitu rasa aman dan nyaman, adil dan sejahtera.
4. Partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan membentuk opini masyarakat, membawa pemimpin berkuasa dipemerintahan serta mengusahakan para pendukungnya mendapat keuntungan dari dukungan tersebut.
5. Partrai politik memiliki empat karakteristik: (1) Organisasi yang berjangka panjang, (2) Memiliki struktur organisasi yang berjenjang dan adanya pembagian divisi disetiap masing-masing level, (3) Memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk megimplementasikan kepentingan rakyat, dan (4) Meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pengertian partai politik telah dijelaskan di atas, sekarang, jika dikaitkan dengan Islam, apa yang dimaksud dengan partai politik Islam.? Islam dalam konteks ini dipahami sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. Sebagai mana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Islam merupakan agama komprehensif yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologis Islam.³²

Dari sinilah kemudian muncul istilah partai Islam, atau partai yang dilandaskan pada simbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim tak bisa mengelak dengan

³² Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hal, 8

menjamurnya partai-partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam.³³

Pembahasan bagaimana format dan bentuk partai Islam tidak lepas dari pola hubungan Islam dan politik yang sekarang ini berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Partai Islam semacam Partai Keadilan Sejahtera, PPP dan PBB secara tegas menamakan dirinya partai Islam. Sementara PKB serta PAN yang jelas berlatarbelakang sebagai organisasi sosial keagamaan menamakan dirinya sebagai partai terbuka bagi penganut agama manapun.³⁴

Indonesia, pembagian partai politik sangat beragam. Masing-masing partai politik memiliki ideologi dan nilai perjuangannya. Ada partai yang berbasis ideologi (nasionalis, sosialis, komunis, demokrat, pancasila dan lain-lain), berbasas dan berbiasis agama (Islam, Kristen, Protestan, Yahudi dan lain-lain), berbasis etnis kedaerahan (Minang, Jawa, Madura, Bugis), berbasis profesi (Guru, pengusaha, buruh, mahasiswa, pelajar), berbasis programatik, dan lain sebagainya. Feith dan Castle mengelompokkan aliran politik di Indonesia selama rentang 1945-1965 ke dalam lima arus utama, yaitu: (1) Nasionalis Radikal (2) Tradisionalisme Jawa (3) Islam (4) Sosiolisme Demokratis (5)

³³ Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, Semarang, Walisongo Press, 2010, hal, 15

³⁴ *Ibid.*, hal, 15

komunisme. Sedangkan selama era Orde Baru terutama sejak terjadinya fusi partai pada pemilu 1977-1997, aliran politik hanya terbagi menjadi dua, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam serta satu golongan karya.³⁵

Berdasarkan kajian ilmu politik, penggunaan istilah “partai Islam” setidaknya memiliki dua konotasi. *Pertama*, ideologi organisasi, yaitu merujuk pada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Ideologi organisatoris dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu partai dengan partai yang lainnya. dalam pengertian ini, yang termasuk partai Islam di Indonesia antara lain Masyumi, Partai NU, PSII, Parmui, PPP, PBB, dan PKS. *Kedua*, basis sosio-kultural, dimana partai politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat, atau kelompok-kelompok di masyarakat, untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sehingga, identitas dari sebuah partai bukan hanya bentuk organisasinya, namun lebih kepada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya. Selaras dengan itu, berdasarkan data dan fakta historis, membagi partai yang berasas Islam kedalam tiga kategorikan: (1) Partai Islam yang berasaskan Islam (2) Partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila (3) Partai Islam yang

³⁵ *Ibid.*, Hal., 8

berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Muslim.

C. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Islam

Persoalan politik boleh dikata sama tuanya dengan usia manusia. Sejak lahir ke dunia dan terlibat dalam segala urusan mondial, ia telah bergumul dalam berbagai persoalan politik dalam rangka memenuhi ambisi dan obsesi biologis maupun spiritualnya. Perbenturan ambisi dan obsesi itu merupakan cikal bakal rekadaya manusia merumuskan langkah-langkah strategis dalam proses perjuangan menegakkan eksistensi kehidupannya. Arus kompetisi, sejak tingkat paling elementer sampai bersekala global, juga bermuara pada realitas ini. Atas dasar itu pula, secara simbolik manusia sering disebut sebagai makhluk yang suka berpolitik (*zon politicon atau homo politicus*). Politik ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja sering dengan arus kompetisi kehidupan manusia. Politik juga bisa disebut sebagai “cara” yang memang harus lahir sebagai media manusia merengkuh harapan.³⁶

Islam memang sangat rentan dan dekat dengan politik. Dalam Islam Rasulullah saw. Sendiri pernah menggunakan kata politik (*siyasa*) dalam sabdanya: “*Adalah Bani Israil, mereka*

³⁶ Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994, bagian pengantar. Hal. v

diurusi urusannya oleh para nabi (tausushumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, namun akan ada banyak para khalifah” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari berbagai dasar tersebut menjadi lebih jelas bahwa politik atau *siyasah* dalam Islam itu makna awalnya adalah mengurus, memang atau mengatur urusan sosial masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti mempertahankan dan mengurus kondisi dan persoalan masyarakat, persoalan rakyat. Salah satu tujuan dari pengaturan itu adalah menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh-musuh yang hendak merusak kehidupan masyarakat baik kekuatan perusak yang asalnya dari dalam maupun dari luar. Bahkan yang lebih tepat lagi adalah bahwa politik dalam dunia Islam bisa diartikan sebagai usaha menggembala atau mengasuh rakyat. Menggembala atau mengasuh disini artinya adalah melayani apa yang dibutuhkan rakyat, memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat. Bahkan moralitas politik dalam Islam harus sesuai dengan moralitas Islam itu sendiri yakni terlibat dalam penderitaan manusia³⁷. Karena itulah sebuah masyarakat muslim perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, menegur kesalahannya, dan

³⁷ Menurut Gus Dur, Moralitas Islam adalah moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan sesama manusia, bukannya justru menghukumi mereka yang menderita itu. Lihat Abdurrahman Wahid, Tuhan tidak Perlu Dibela, Cet.V (Yogyakarta: LkiS, 2010). Hlm. 87

bahkan mengkritik para pemimpin yang menindas rakyatnya, bahkan kalau perlu melawan para pemimpin yang dzalim yang menyalahgunakan kekuasaan.³⁸ Ajaran Islam merupakan ajaran yang berintikan dan bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang bagi seluruh penduduk alam semesta sebagaimana Allah berfirman (Qs, Al-Anbiya': 107) sebagai berikut:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Artinya: *Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Agama untuk manusia, menghormati manusia dan kemanusiaan, menjunjung tinggi hak-hak asasi dan kehormatan manusia. Akan tetapi inti ajaran kasih sayang ini, tidak dengan mudah bisa diterima oleh orang-orang kafir Mekkah, mereka lebih senang dan bangga mempertahankan dan membela agama nenek moyang mereka, agama yang menyembah berhala.³⁹

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam mempunyai nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan kedalam setiap aspek kehidupan manusia, baik manusia sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial (anggota masyarakat). Maka dalam menjabarkan ajaran Islam dalam aspek kehidupan

³⁸ Abd. Halim,. *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS. 2013 hal. 25

³⁹ Ahmad Rofiq,. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya. 2015. Hal. 40.

diperlukan adanya usaha sungguh-sungguh oleh setiap Muslim untuk mempelajari dan menghayati nilai Islam kemudian dirumuskan kedalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut.⁴⁰

Menurut Nurcholis Madjid, menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Madjid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik *al-Khulafa al-Rasyidin*. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode *al-Khulafa al-Rasyidin*, Islam menampilkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik rakyat yang universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuk saat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian oleh sistem monarki Umayyah.⁴¹

Sementara Abdurrahman Wahid, adalah intelektual muslim yang menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam konteks

⁴⁰ Adnan, *Islam Sosial*, Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003, hal, 36-37

⁴¹ Aden Wijdan SZ. Dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insani Press: 2007: hal, 202

kehidupan berbangsa. Menurutnya, kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi negara, sementara Islam (syari'ah) harus difungsikan sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi pemerintah Islam adalah urusan pribadi, yang dapat secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral.⁴²

Sedangkan politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik berbeda dengan ilmu *political action*. Aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik, karena itu, aksi politik adalah tindakan yang diambil sebagai konsekuensi untuk menjalankan teori-teori politik. *Political aktion is reduction political theory*.⁴³

Politik di samping itu juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda yaitu antara lain:⁴⁴

1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).

⁴² *Ibid*, hal. 203

⁴³ Fatahullah Jurdi, *Sejarah Politik Indonesia Modern: kajian Politik, Politik Islam, Pemerintahan, Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Yogyakarta: CALPULIS. 2016. Hal: 61

⁴⁴ Fajlurrahman jurdi, "Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai-Partai Islam Memenuhi Hasrat Kekeuasaan". Yogyakarta, Antonylip-Indonesia bekerjasama dengan PuKAP-Indonesia, cetakan pertama Maret 2009

2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik dalam usahanya untuk mendapatkan kekuatan legitimasi harus memiliki gagasan-gagasan yang memiliki nilai tawar kepada negara sehingga negara merestui kehadiran politik sebagai ilmu. Artinya ilmu politik itu adalah sebagai ilmu yang mempelajari negara sebagai obyek kajian. Oleh karena itu, sebenarnya ilmu politik itu adalah ilmu yang statis, tetapi yang membuat ilmu politik itu dinamis adalah karena negara membutuhkan untuk membangun dan merespon persoalan-persoalan kenegaraan. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu membutuhkan obyek untuk menerapkan nilai-nilai yang dikandung-Nya. Maka tempat atau obyek untuk itu adalah negara yang di dalamnya tercakup lembaga-lembaga negara.⁴⁵

Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Tentunya, tujuan dari partai politik Islam tidak terlepas dari keberadaan

⁴⁵ Fatahullah Jurdi, *Sejarah Politik Indonesia Modern: kajian Politik, Politik Islam, Pemerintahan, Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Yogyakarta: CALPULIS. 2016. Hal: 62

sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam adapun tujuan dari partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *Baldatun thayyibatun warabbun ghafur* yang artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT. Dari tujuan ini, dapat dirumuskan empat tujuan pertama partai Islam.⁴⁶

1. Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.⁴⁷
2. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti, hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hal, 13

⁴⁷ *Ibid.*, Hal 13

⁴⁸ *Ibid.*, Hal., 13

3. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagiannya seseorang tidak hanya segi materi tetapi juga dari segi psikis, misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka.⁴⁹
4. Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.⁵⁰

D. Relasi Agama dan Negara

Sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu

⁴⁹ *Ibid.*, Hal., 13

⁵⁰ *Ibid.*, Hal., 13

yang berhubungan dengannya. Memang pada awalnya ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah negara.⁵¹

Apa itu negara, sudah banyak orang mendefinisikannya. Miriam Budiardjo, misalnya, mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Sementara Max Weber mengartikan negara sebagai suatu yang dimiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.⁵²

Memang, istilah negara (*dawlah*) tidak disinggung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Umpamanya, Al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman. Dalam Al-Qur'an juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan

⁵¹ Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes (Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal, 15

⁵² *Ibid.* Hal, 16

perang atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Subyek-subyek aneka ragam hukum maupun petunjuk-petunjuknya itu tidak lain adalah umat Islam yang diisyaratkan Al-Qur'an sebagai kesatuan umat yang istimewa. Dengan kata lain, umat Islam dinyatakan sebagai suatu masyarakat yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain karena kebijakan yang mereka miliki, yakni kebijakan sifat-sifat mereka. Ringkasnya umat Islam adalah suatu masyarakat politik yang sanggup mencukupi diri sendiri.⁵³

Negara pada awalnya adalah ruang hampa tanpa makna yang kemudian hadir sebagai bagian dari proses reproduksi sosial. Negara yang terdiri atas tanah, udara, rakyat, sistem, dan pemerintahan menjadi kata substantif ketika terikat dalam sebuah wadah bernama hukum. Politik, yang menjadi unsur primer dalam kehidupan bernegara, mengisi ruang kosong pada wadah tersebut. Oleh karena itu, definisi tentang negara dan politik, lahir dari ruang dan waktu yang sama.⁵⁴

Tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama

⁵³ Khalid Ibrahim IJindan. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994, hal. 49

⁵⁴ Tamsil Linrung. *Politik Untuk Kemanusiaan Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 2014. Hal. 22.

membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Pemikiran seperti ini bisa dirunut dari mulai Ibnu Abi Rabi' (hidup pada abad IX M), al-Farabi (870-950 M), al-Mawardi (975-1059), al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1329 M). Hingga Ibn Khaldun (1332-1406 M). Al-Mawardi misalnya mengatakan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama (*harasah ad-din*) dan mengelola kebutuhan duniawiyah masyarakat (*siyasah al-dunya*).⁵⁵

Sebab itulah, disatu sisi negara dilihat para ahli politik Islam klasik dan pertengahan sebagai representasi masyarakat yang membutuhkan agama sebagai pedoman yang menurut Ibn Khaldun lebih baik ketimbang hasil rekayasa rasio manusia. Namun, dipihak lain agama pun merupakan sarana pokok untuk menjelaskan cita-citanya. Politik atau negara menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan Islam.⁵⁶

Menurut Azhary, gagasan-gagasan tentang tentang konsep negara dibarat dalam proses perjalanannya mengalami

⁵⁵ Sukron Kamil., *Pemikiran Politik Islam Tematik (Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013. Hal. 4

⁵⁶ Sukron Kamil, *Op, cit.* Hal. 5

perubahan-perubahan.⁵⁷ Semula konsep negara di barat ditandai kekosongan doktrin negara dalam agama Kristen. Tetapi dalam proses perkembangan pada abad pertengahan, agama Kristen menduduki posisi sentral dan dominan dalam kehidupan negara. Pada masa ini muncul teori negara teokrasi mutlak dari Agustinus. Dalam pemikirannya, Agustinus menolak negara di bumi karena tak ubahnya sebagai Negara Iblis yang hanya akan memberikan kesengsaraan kepada manusia. Untuk itu ia mendambakan Negara Tuhan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Di sini terlihat faktor ketuhanan dalam pemikiran Agustinus sangat dominan.

Munculnya perdebatan tentang agama dan negara ini berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dan Hadits. Perdebatan itu memang terjadi karena memang dalam memandang kedua sumber utama ajaran Islam tersebut tidak bersifat monolitik tetapi multi-interpretatif. Seperti diketahui, bukan hanya masalah hubungan agama dan negara saja, jauh sebelum itu, sudah lama muncul berbagai mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Dalam bidang teologi, muncul aliran-aliran teologi, seperti aliran Mu'tazilah, Jabariyah, Qodariah, Ash'ariyah, dan Maturidiah. Sedang dalam lapangan filsafat muncul pemikiran filsafat Ibnu Rush, Ibnu Sina, Al-

⁵⁷ M. Tahrir Azhary. *Negara Hukum: suatu tinjauan Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Hal, 27

Farabi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Beragamnya pemikiran tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam itu multi-interpretatif. Watak Islam yang demikian ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Karena itu, tidak heran bila dalam menafsirkan masalah hubungan agama dan negara pun demikian.

Menurut Al-Farabi, konsep negara itu seperti struktur tubuh manusia yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda seperti yang telah dinyatakan oleh Plato, filsuf Yunani. Negara ideal dalam angan-angan Al-Farabi adalah negara utama, yaitu negara yang dipimpin oleh seorang kepala negara, dibantu oleh mereka yang berbakat membantu kepala negara. Di bawahnya masih ada lagi yang membantu struktur di atasnya. Sederhananya, sistem masyarakat itu seperti piramida. Di atasnya diduduki oleh filsuf, di bawahnya ada kelompok tentara yang mendukung penguasa dan di bawahnya lagi ada masyarakat tani, tukang dan lainnya. Untuk menjadi seorang kepala negara, setidaknya harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu, lengkap anggota badannya, baik pemahaman, daya ingat, dan intelektualitasnya, cerdas, pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya, cinta ilmu pengetahuan, tidak rakus, cinta kejujuran dan benci kebohongan, berjiwa besar dan

berbudi luhur, cinta keadilan dan benci kedzaliman, kuat pendirian, dan tidak terikat dengan materi atau uang.⁵⁸

Ibn Taimiyah juga berpendapat senada dengan Al-Mawardi. Dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa “sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan Negara agama tidak bisa berdiri tegak” enam puluh tahun dibawah pemimpin yang bobrok itu lebih baik dari pada satu malam tanpa adanya pemimpin yang berkuasa”.⁵⁹

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan timbal balik yang saling mengisi. Lebih-lebih dalam pengalaman Indonesia yang ketika Islam masuk secara damai dan berkolaborasi dengan budaya dan kearifan lokal setempat, menjadikan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Bahkan perkembangannya, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Namun demikian, ternyata mereka tidak serta merta ingin memaksakan kehendak

⁵⁸ Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010. Hal., 13-14

⁵⁹ Ahmad Rofiq,. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya. 2015. Hal. 4

mereka, untuk menjadikan agama Islam sebagai dasar Negara atau setidaknya dijadikan sebagai agama Negara.⁶⁰

Pemikiran politik Islam, dalam pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekularistik*).⁶¹

Paradigma pertama yang menyatakan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena melihat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga mencakup politik atau negara. Allah melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Allah Maha Benar dan Maha Adil,

⁶⁰ *Ibid.*, 4

⁶¹ Din Syamsudin menyebutnya atas tiga hal tersebut terdiri dari paradigma *ingrated*, *simbiotik*, dan *sekularistik*. Sementara Umaruddin Masdar menyebutnya dengan konservatif, modernis, dan liberal. Lihat Din Syamsudin, "Usaha Konsep Pencarian Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV tahun 1993. Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

maka aturan-aturan-Nya pastilah benar dan adil. Karena manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Karena itu, manusia harus taat dan tunduk pada Allah. Berdasarkan itu maka untuk mengelola negara, tinggal melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam pandangan kelompok ini, syari'ah dipahami dipahami sebagai totalitas yang *par excellent* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Karena itu legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah.⁶²

Paradigma ini dianut baik oleh kalangan Syi'ah maupun oleh kalangan Sunni. Bagi kalangan Syi'ah, agama (imamah) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan yang diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad. Legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan, dan hal ini hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad. Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legimitasi keagamaan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan “kedaulatan Tuhan”, maka negara

⁶² Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes (Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal, 21-22

bersifat teokratis, dimana kekuasaan mutlak berada di “tangan” Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan.⁶³

Sementara pemikir dari kalangan Suni dapat dilihat dari pandangan Muhammad Rasyid Ridha, Sayid Quthb, dan Abul A’la Maududi. Ketiga pemikir ini berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu meniru sistem lain. Di sini, ketiga pemikir ini anti pada sistem politik Barat. Bagi mereka, sistem politik Barat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Islam memiliki sistem politik sendiri, sebagaimana yang telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin.⁶⁴ Seperti dikatakan Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, Islam mempunyai sistem politik sendiri yang meliputi, yaitu (1) kedaulatan milik Allah; (2) keadilan dan persamaan; (3) taat dan (4) syura.⁶⁵

Abul A’la Maududi mengataka bahwa Syari’ah merupakan skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Dalam kaitan ini maka,

⁶³ Din Syamsudin, *Ibid.*, Hal, 26

⁶⁴ Munawir Sjadzail, *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990. Hal. 205.

⁶⁵ Lili Romli. *Ibid.*, Hal., 23

pemerintahan Islam harus dibangun diatas perundang-undangan syari'ah dan harus diterapkan dalam kondisi apa pun. Negara Islam yang berdasarkan Syari'ah itu harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu (1) mengakui kedaulatan Allah; (2) menerima otoritas Nabi Muhammad; (3) memiliki status “wakil Allah” dan (4) menerapkan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam negara pemegang kedaulatan sesungguhnya berada pada Allah. Dalam kaitan ini Maududi menyebutnya bukan negara teokrasi, tetapi teo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem teokrasi yang pernah diterapkan oleh dunia Kristen. Dalam dalam sistem teo-demokrasi, kaum muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Allah.⁶⁶

Pendekatan kedua yang menyatakan bahwa antara agama dan negara saling terkait dan berhubungan berdasarkan pada argumen bahwa agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang.⁶⁷ Begitupun, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Para pemikir Islam yang termasuk dalam paradigma ini antara lain adalah Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali.

⁶⁶ Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Jakarta: Bandung, Mizan, 1998. Hal, 160.

⁶⁷ Din Syamsudin, *op.cit.*, Hal. 6.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama dan negara benar-benar berkelindan satu sama lain. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Begitu pula negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Sementara menurut pandangan Al-Mawardi, syari'ah (agama) memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politi. Di sini ia mencoba mengonpromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik. Sedangkan Al-Ghazali, antara lain, mengisyaratkan hubungan yang paralel antara agama dan negara. Seperti dicontohkan dalam paralelisme Nabi dan raja. Agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar, penguasa negara adalah penjaga.⁶⁸

Ketiga adalah paradigma yang menyatakan perlunya adanya pemisahan antara agama dan negara. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan paradigma yang kedua. Pelopor paradigma ini adalah Ali Abdur Roziq, Ulama dan pemikir dari Mesir.⁶⁹ Dalam kalangan Islam, pemikiran tentang pemisalahan antara agama dan negara yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq ini bukan saja ditolak, tetapi juga bersifat

⁶⁸ Hussein Muhammad, " *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*", dalam Ahmad Saudy, ed. *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta: LkiS, 2000,. Hal, 93

⁶⁹ Din Syamsudin, *op.cit.*, Hal. 8.

kontroversial karena pandangan-pandangan dan hujah-hujah yang dilontarkannya tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam Wa Usul al-Hukm* mengemukakan bahwa: (1) Syari'at Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi; (2) Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi maupun Khulafaur Rasyidin; (3) kekhalifahan bukanlah sistem politik keagamaan atau keIslaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi; (4) kekhalifahan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam bagian lain, Ali Abdul Roziq menolak keras pendapat bahwa Nabi pernah dirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Misi dari Nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Tuhan. Ia bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik.⁷⁰

Paradigma bersatunya agama dan negara ini dalam meleakukan praktik politik menggunakan pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik adalah pendekatan yang cenderung mementingkan bentuk dari pada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan.⁷¹ Menurut Syafi'i Anwar, pendekatan formalistik menunjukkan perhatian

⁷⁰ Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes (Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal, 25-26

⁷¹ Lili Romli., *op.,cit.*, Hal. 30.

terhadap suatu orientasi yang cenderung menopong bentuk-bentuk masyarakat politik yang dibayangkan (*imagined Islamic polity*), seperti terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik Islam, dan lain-lain.⁷²

Secara garis besar pendekatan formalistik ini berpandangan Islam harus menjadi dasar negara, syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Allah, gagasan tentang negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenai batas-batas politik atau kedaerahan, dan sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan negara Islam.⁷³ Pendekatan formalistik menurut terminologi Gulalp masuk dalam kategori "Islam politik". Islam politik, menurut Gulalp, adalah Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik yang kemudian menjelma dalam bentuk partai politik. Dengan demikian Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau

⁷² M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, Jakarta; Paramadina, 1995, Hal. 144

⁷³ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Prisma, 1995. Hal. 12

kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang legeslatif dan eksekutif.⁷⁴

Pandangan Gus Dur dalam format Islam dalam politik. Menurutnya, Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal politik-kenegaraan. Memang, Islam tidak akan pernah lepas dari politik, yakni dalam pengertian melakukan transformasi sosial-kemasyarakatan. Hanya wujud dan formatnya yang tidak diberikan aturannya yang tegas.

⁷⁴ Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes (Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal, 31

BAB III

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM

A. Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman Al-Dakhil. Tetapi populer dengan nama Abdurrahman Wahid. Kata “ad-Dakhil” berarti “sang penakluk”. Sebuah nama yang diambil dari seorang keturunan Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di tanah Spanyol.¹ Namun, rupanya kata *AddaKhil* ini tidak cukup dikenal hingga ia kemudian menggantinya dengan “Wahid” menganbil nama belakang sang ayah. Pada perkembangannya kemudian ia justru lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. *Gus* adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti “abang” atau “mas”.²

Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4 mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Dia lahir tanggal 7 September 1940 di Desa Danayar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari enam

¹ Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara. 2009. Hal., 35

² Ali Masyakur Musa, , *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Erlangga. Hal., 4

bersaudara. Ayahnya adalah seorang pengurus organisasi besar Nahdlatul Ulama, yang bernama K.H. Wahid Hasyim. Sedangkan, ibunya bernama Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denayar, Jombang, K.H. Bisri Syamsuri, dari perkawinannya dengan Shinta Nuriyah, mereka dikarunia empat orang anak yaitu, Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayarunnufus, dan Inayah Wulandari.³

Gus Dur pada saat wawancara dengan wartawan, seperti dilansir *Tempo Interaktif*, Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia sesungguhnya masih memiliki darah Tionghoa dan keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak yang aslinya bernama Tan Eng Hwa. Tan Eng Hwa dan Tan A Lok merupakan anak dari putri Campa. Seorang putri Tiongkok yang menjadi selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan Louis-Charles Damais, seorang peneliti Prancis, diidentifikasi sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang makamnya ditemukan di Trowulan, Jawa Timur.⁴

³ Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hal. 71

⁴ Ali Masyakur Musa,, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Erlangga. Hal., 5.

Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus, tampaknya teman-teman dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan hari ulang tahunnya di Istana Bogor pada hari jum'at 4 agustus 2000 tak sadar bahwa sebenarnya hari ulang tahun Gus Dur bukanlah tanggal itu. Sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam hidupnya dan juga pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni bahwa Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan kedelapan dalam penanggalan Islam.⁵ Sebenarnya, tanggal 4 Sya'ban 1940 adalah tanggal 7 september.⁶ Gus Dur dilahirkan di Denayar, dekat kota Jombang, Jawa Timur,

⁵ Tak terpikir oleh Ibunya yang masih muda (yang dalam tahun-tahun pertama perkawinannya bisa membaca huruf Arab, tetapi tidak bisa membaca huruf Latin) bahwa pejabat catatan sipil setempat dimasyarakat pedesaannya yang merepukan seorang muslim saleh akan mencatat tanggal 4 Agustus sebagai tanggal lahir anak sulungnya ini. Cerita ini didasarkan pada wawancara saya dengan Gus Dur dan putri-putrinya, terutama Alissa dan Yenni. Dengan mereka ini, Solichah sering bercerita tentang masa mudanya. Mungkin sekali Solichah meromantisir bagian-bagian dari periode ini hingga saat suaminya, Wahid Hasyim, meninggal pada tahun 1953, tetapi reputasinya sebagai seorang tokoh yang penuh percaya diri memberi jaminan bahwa ingatannya cukup dapat dipertanggungjawabkan.

⁶ Ada juga alasan untuk meragukan hal ini. Rincian mengenai kelahirannya dan juga mengenaikelahiran lima saudaranya, dicatat dalam buku do'a keluarga. Akan tetapi karena buku ini hilang sekitar pertengahan tahun 1960-an, dan catatan resmi tidak ada lagi, kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya yakin akan fakta-fakta itu.

di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syanuri.⁷

Kakek Gus Dur dari pihak ayah, Kiai Hasyim Asy'ari, dilahirkan di Jombang pada bulan Februari 1871 dan meninggal di Jombang pada bulan Juli 1947. Dia adalah seorang tokoh yang mendirikan NU pada tahun 1926. Dia sangat dihormati sebagai pemimpin Islam dalam masyarakat pedesaan tradisional.⁸ Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak memberi inspirasi sekaligus sebagai seorang terpelajar. Akan tetapi, dia juga seorang nasionalis yang teguh dalam pendirian. Banyak dari

⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta:LkiS. 2002. Hal., 25-26

⁸ Sketsa-sketsa biografi dalam bab ini yang berkenaan dengan kakek, orang tua, dan anggota keluarga Gus Dur lainnya didasarkan pada bahan yang diambil dari sejumlah besar wawancara dengan Gus Dur dan teman-teman, serta sanak saudara. Untuk menghindari terlalu banyaknya catatan akhir saya tidak mengacu satu persatu kepada wawancara-wawancara tersebut terkecuali memang benar-benar diperlukan.

Mengenai hal ini tentu, pemahaman Gus Dur mengenai sejarah keluarganya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dari sumber-sumber lain dan juga sangat mungkin bahwa dalam beberapa hal keterangannya kurang tepat. Misalnya, banyak sejarawan bereaksi sangat skeptis mengenai apa yang dianggapnya sebagai silsilah keluarganya . studi-studi ilmiah mengenai hal ini pada masa mendatang harus secara kritis memeriksa hal-hal ini, memberikan tekanan yang lebih besar pada usaha memahami bagaimana pemahaman sejarah Gus Dur telah membentuk pikiran dan tingkah lakunya. Banyak keterangan rinci mengenai kehidupan kakek dan ayah Gus Dur di ambil dari buku Saifullah Ma'sum (*ed.*), *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan1926, bahan mengenai Kiai Hasyim Asy'ari. Hal. 67

teman-temannya merupakan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis pada periode sebelum perang.⁹

Kakek Gus Dur dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri tidaklah setenar Kiai Hasyim Asy'ari dalam masyarakat kota yang sekuler. Akan tetapi, dia pun aktif dalam pergerakan nasional. Bisri Syanuri dilahirkan pada bulan September 1886, di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren. Di daerah pesisir ini, Islam masuk lebih awal dari pedalaman, yang masih menganut Hindhu-Budha. Bersama Hasyim Asy'ari, dia dinanggap sebagai salah seorang tokoh kunci lahirnya NU. Pada tahun 1917, dia memperkenalkan kedunia pesantren, kelas pertama bagi santri puteri di pesantrennya yang baru didirikan di desa Denanyar, yang terletak di luar Jombang.¹⁰

Ayah Gus Dur, Wahid Hasyim, dilahirkan di Tebuireng, Jombang, pada bulan Juni 1914. Ia adalah putera laki-laki pertama dan anak kelima dari sepuluh bersaudara. Menurut Gus Dur, Nyai Hasyim Asy'ari, yang tiada lain adalah nenek Gus Dur sendiri, menderita sakit keras ketika sedang mengandung Wahid Hasyim. Nyai Hasyim kemudian bersumpah apabila anak yang dikandungnya ini dapat lahir dengan selamat maka ia akan

⁹ Greg Barton, Biografy Gus Dur: The Authorized Biograpy of Abdurrahman Wahid, Yogyakarta:LkiS. 2002. Hal., 27

¹⁰ *Ibid.* Hal. 26.

membawanya ke Kiai Cholil di Madura. Nyai Hasyim Asy'ari pun akhirnya berangsur-angsur sembuh dan kemudian dapat melahirkan Wahid Hasyim tanpa kesulitan. Sesuai dengan sumpahnya, ia pun membawa anaknya ke Madura agar bisa diberkati oleh guru suaminya. Oleh banyak orang, kejadian dianggap sebagai pertanda bahwa si anak (Wahid Hasyim) akan menjadi orang besar.¹¹

Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya.¹² Selain itu, dia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Di samping membaca, dia juga hobi bermain bola, catur, dan musik. Bahkan, Gus Dur pernah diminta menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemaran ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya Gus Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.¹³

¹¹ *Ibid.*, Hal. 31

¹² Badiatul Rozikin, *op.,cit.* Hal., 36.

¹³ Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hal. 71-72

Tahun 1953-1957, setelah tamat SD, Gus Dur melanjutkan belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMPEP) di Tanah Abang.¹⁴ Setahun berikutnya pindah ke SMPEP Gowongan Yogyakarta.¹⁵ Gus Dur tinggal di rumah pemimpin modernis, K.H. Junaidi, ulama anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Setelah itu, ia banyak menghabiskan waktunya nyantri di beberapa pesantren terkemuka. Dari tahun 1957 hingga 1959, ia nyantri di Tegalrejo, Magelang. Dari tahun 1959-1963, ia belajar di Mu'allimat Bahrul 'Ulum Pesantren Tambakberas Jombang, ia juga pernah nyatri di pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal di rumah pemimpin NU terkemuka KH. Ahmad Ma'shum.¹⁶

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di Pesantren Tambakberas, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkawinannya dilaksanakan

¹⁴ Munawar Ahmat, *Ijtihat Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LkiS, 2010. Hal 84

¹⁵ Ibunya berharap, kepindahan ke Yogyakarta, selain untuk kepentingan bisa lepas dari lingkungan lama di Jakarta, juga kembali pada latar belakang sebagai anak kiai, yaitu hidup di pesantren.

¹⁶ Badiatul Rozikin, *op.cit.* Hal., 36-37

ketika Gus Dur berada di Mesir.¹⁷ Tepatnya pada pertengahan tahun 1968, Nuriyah, yang saat itu telah secara resmi bertunangan dengan Gus Dur selama hampir dua tahun, menamatkannya studinya di Pesantren Tambakberas Jombang dan akan meneruskan studinya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸

Ketika beranjak dewasa, Gus Dur baru tahu bahwa ayahnya adalah seorang tokoh yang populer dan pengaruh. Namun sukar bagi seorang anak untuk benar-benar memahami hal ini. Barulah ketika ia membawa pulang jenazah ayahnya ke Jakarta ia baru tahu betapa besar rasa hormat dan cinta orang kepada ayahnya. Pada saat rombongan melewati jalan di Bandung dan kemudian ke jalan raya, Gus Dur tercekam melihat demikian banyaknya orang yang berbaris ditepi jalan untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada ayahnya, Wahid Hasyim. Di setiap kota dan desa, jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang yang berduka. Mereka menunggu dengan sabar di tengah terik matahari untuk dapat menyaksikan perjalanan terakhir seorang tokoh yang sangat mereka cintai.¹⁹

Tahun 1964, Gus Dur pergi ke Kairo, Mesir untuk belajar di *Ma'had al-Dimsat* yang berada di lingkungan Al-Azhar

¹⁷ Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hal. 72

¹⁸ Greg Barton, *Op.cit.*, hal., 109

¹⁹ Greg Barton, *Biografy Gus Dur: The Authorized Biograpy of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta:LkiS. 2002. Hal., 45

Islamic University. Gus Dur dibuat kecewa dengan atmosfer intelektual di Al-Azhar yang bisa memadamkan potensi pribadinya, karena teknik pendidikannya yang masih bertumpu pada kekuatan hafalan.²⁰

Gus Dur waktu dari Kairo pindah ke Baghdad. Di kota ini, dia merasa cocok karena ia tidak hanya dapat mempelajari sastra Arab, filsafat, dan teori-teori sosial Barat, tetapi dia bisa memenuhi hobinya untuk menonton film-film klasik. Bahkan, Gus Dur merasa lebih senang oleh sistem yang diterapkan Universitas Baghdad, yang dalam berbagai segi dapat dikatakan lebih berorientasi Barat dari pada sistem yang diterapkan al-Azhar. Selama belajar di Timur Tengah inilah, Gus Dur menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia untuk Timur tengah (1964-1970).²¹

Sepulang dari pengembarannya dari mencari ilmu. Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada 1971, dia bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebuireng Jombang. Tiga tahun kemudian, dia menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng. Dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai menjadi

²⁰ Badiatul Rozikin, *op.cit.* Hal., 36.

²¹ Badiatul Rozikin, *op.cit.* Hal., 36.

penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapatkan perhatian banyak.²²

Tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya. K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebuireng, Jombang, dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama, di LP3ES bersama Dawan Rahardjo, Aswah Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimonotori oleh LP3ES.²³

Tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula dia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara, pada awal 1990, Gus Dur dipercaya sebagai wakil khatib syari'ah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik dilapangan, kebudayaan, politik, maupun pemikiran ke-Islaman. Karier yang dianggap “menyimpang” dalam kapasitasnya sebagai seseorang tokoh

²² Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hal. 72

²³ *Ibid.*, Hal., 72

agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Dia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1987.²⁴

Tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *abl hall wa al-'aqdi* yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada Mukhtar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Mukhtar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989) dan Mukhtar di Cipasung, Jawa Barat (1994). Jabatan ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4. Selama menjadi Presiden, tidak sedikit pemikiran Gus Dur yang kontroversial pendapatnya sering berbeda dari pendapat banyak orang.²⁵

Putra Jombang ini merupakan keturunan Kiai dalam segala karakteristiknya, yaitu merupakan simbol kekiaian tradisional. Gus Dur dengan ciri khasnya ber celana panjang berbaju batik, kupiah (songkok nasional) hitam, dan yang khas pakai kacamata tebal. Orang tidak akan mengira dibalik kesederhanaannya itu muncul sesuatu yang mnegejutkan, kalo ia berbicara tentang umat Islam Indonesia, oleh para Kiai NU

²⁴ *Ibid.*, Hal., 72.

²⁵ <http://www.tunas63.wordpress.com/2009/12.../biografi-gus-dur-dan-keluarga>

disebut suka *nyeleneh*. Kenyelenehan dan kekontraversialan Gus Dur itu masih berlangsung sampai saat dia menjabat sebagai Presiden hasil pemilihan umum tahun 1999.²⁶

Selama masa kepemimpinannya di NU (tiga periode), banyak kronik, dinamika, dan gebrakan sosial-keagamaan yang sebelumnya masih asing, bahkan dianggap “tabu” dikalangan NU. Seperti diketahui, NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai karakter tradisional baik pemahaman keagamaan maupun dalam praktiknya. Citra demikian sudah menjadi karakter khas jami’iyah ini, NU ditangan Gus Dur saat itu sudah mengalami transformasi “revolusioner” dalam semua dimensi pemahaman dan sebagian praktik keagamaan tradisional itu.²⁷

B. Corak Pemikiran dan Karya-karyanya

Sebagai intelektual *Sunni* tradisional pada umumnya, Gus Dur membangun pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni klasik.²⁸ Oleh karena itu wajar saja jika yang menjadi kepedulian utamanya minimal menyangkut tiga hal. *Pertama*, revitalisasi khazanah Islam

²⁶ Akhmad Taufik., *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Hal, 72

²⁷ *Ibid.*, Hal., 73

²⁸ M. Bukhori Pahrroji, *Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Ali Abd Ar-Raziq*.Bantul: Pondok Sanusi. 2003. Hal.4

tradisional *Ahl-As-Sunnah Wal Jama'ah*. *Kedua*, ikut berkiprah dalam wacana modernitas; dan *ketiga*, berupaya melakukan pencarian jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat Islam Indonesia. Corak pemikiran Gus Dur yang liberal dan inklusif sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.²⁹

Gus Dur jika dilacak, dari segi kultural, melintasi tiga model lapisan budaya. *Pertama*, kultur dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan *appreciate* dengan budaya lokal. *Kedua*, budaya timur tengah yang terbuka dan keras; dan *ketiga*, lapisan budaya barat yang liberal, rasional dan sekuler. Semua lapisan kultural itu tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur membentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Ia selalu berdialog dengan semua watak budaya tersebut. Dan inilah barangkali yang menyebabkan Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan tidak segera mudah dipahami, alias kontroversi.³⁰

Status keulamaan Gus Dur turut mempengaruhi skematika pemikiran politiknya. Melalui metode Maqashid Al-Syar'iyah, Gus Dur berupaya melakukan sinergisasi tiga entitas,

²⁹ Brebesy Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.1999

³⁰ *Ibid.*, Hal., 27.

yaitu: *nash*, *falsafah*, dan *'urf*, yang sangat khas membangun ide-idenya. Hasil kajian Barton (1999) menjelaskan alasan pemikiran keagamaan Gus Dur yang liberal dan progresif atau neo-modernis, yaitu: 1). Interpretasi-interpretasi ushul fiqh-nya lebih kuatya disandarkan pada rasionalitas dari pada metodologi tradisional. 2). Pengaruh latar belakang hidupnya yang lebih dekat dengan rasionalitas. Karakter demikian ikut membentuk skematika pemikiran politiknya, sehingga dalam penelitian ini, penulis menempatkan Gus Dur sebagai pemikir yang kritis, karena disetiap artikelnya selalu ditemukan semangat pembebasan dan pencerahan kepada masyarakat dengan cara membuka ruang lain sebagai alternatif untuk melihat. Melalui kurang lebih 500 artikelnya, Gus Dur secara makro mengusung tema yang konsisten, yakni: 1). Mengembangkan khazanah lokalitas Islam klasik di Indonesia: 2). Humanisme sebagai perlawanan terhadap kekerasan: 3). Ide perlawanan kultural: 4). Ide integralisme: dan 5). Analisis ilmiah atas realitas dunia Islam.³¹

Mungkin sudah banyak ditulis orang kritik Gus Dur terhadap *over formalism* keberagaman sehingga melupakan substansi agama yang menurut dia kurang diperhatikan (khususnya dalam konteks Indonesia), yaitu bahwa beragama (apa pun) mestinya membuat yang lain merasa enak, aman, kalau

³¹ Munawar Ahmad., *op..cit.*, Hal., 324-325

perlu malah terlindungi. Kecenderungan formalisme agama sebetulnya juga merupakan akibat dari sebuah proses sosial yang mengakibatkan terjadinya keterasingan (*alienation*) bagi sebagian orang yang merasa tak tertampung.³²

Proses modernisasi dan fenomena modernitas yang secara gegap gempita mendera masyarakat yang sedang berkembang, pada gilirannya membawa dampak sosial berupa, antara lain, *alienasi* tadi. Ujung-ujungnya banyak anggota masyarakat yang mencari pelarian, tempat berteduh dan mencari kepastian baru misalnya rame-rame kembali kemistik atau kembali ke ajaran agama. Gus Dur melihat fenomena ini sebagai perkembangan kurang sehat bukan saja dalam konteks beragama, tetapi juga dalam bermasyarakat. Kerenanya Gus Dur melakukan kritik tajam terhadap fenomena ini dengan segala bentuknya, termasuk *satire* terhadap para tokoh agama yang dianggapnya terlalu simplistik dan egois dalam beragama.³³

Tulisan Gus Dur dari studi bibliografis yang penulis lakukan, ternyata ditemukan ada 493 buah tulisan Gus Dur sejak awal 1970-an hingga awal tahun 2000. Hingga akhir hayatnya (2009), bisa jadi telah lebih dari 600 buah tulisan Gus Dur. Karya intelektual yang ditulis selama lebih dari dua dasawarsa itu

³² Muhammad AS Hikam. *Gus Dur Ku Gus Dur Anda Gus Dur Kita Kenagan Wawancara Imajiner, dan Guyonan Gusdarian*. Bandung : Penerbit Yrama widya. 2013. Hal. 25

³³ *Ibid.*, Hal 27

diklasifikasikan kedalam delapan bentuk tulisan, yakni tulisan dalam bentuk buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, analogi buku, dan makalah, rincian jumlah setiap klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut.³⁴

Tabel 1.

Jumlah Tulisan Gus dur dengan Berbagai Bentuknya Tahun 1970
hingga Tahun 2000

No	Bentuk Tulisan	Jumlah	Keterangan
1	Buku	12 Buku	Terdapat pengulangan
2	Buku Terjemahan	1 Buku	Bersama Hasyim Wahid
3	Kata Pengantar Buku	20 Buku	-
4	Epilog Buku	1 Buku	-
5	Artikel	41 Buku	-
6	Antologi Buku	263	Diberbagai majalah, surat kabar, dan media massa
7	Kolom	105 Buku	Diberbagai majalah
8	Makalah	50 Buku	Sebagian besar tidak dipublikasikan

Sumber: inress (2000: 35)

³⁴ Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hal. 73

Tabel di atas, jelaslah bahwa Gus Dur tidak sekedar membuat pernyataan dan melakukan aksi-aksi sosial politik, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat sipil belaka, tetapi juga merefleksikannya ke dalam tulisan, baik dalam bentuk artikel, kolom, makalah, maupun kata pengantar buku. Hanya saja, karna buku-buku yang diterbitkan itu dalam bentuk bunga rampai tanpa ada rekontruksi dari Gus Dur, kesan ketidak utuhan bangunan pemikiran tidak bisa dihindari. Akan tetapi, barangkali itulah cermin latar intelektual Gus Dur yang bukan berasal dari tradisi akademik “sekolah modern” yang setiap tulisan mesti terikat dengan suatu metodologi dan referensi formal.³⁵

Spektrum intelektualitas Gus Dur mengalami perluasan dari waktu ke waktu, terutama wacana yang dikembangkan. Temuan *inress* (2000) mengidentifikasi perkembangan tersebut sesuai dengan periodisasi per sepuluh tahun, mulai 1970 hingga 2000. Inress memberi perhatian terhadap *jumlah* (kuantitas) dan isi (*content*) dari produk intelektual Gus Dur dalam kurun waktu 10 tahunan. Data tersebut di tunjukkan dalam Tabel 2, sebagai berikut:³⁶

³⁵ *Ibid.*, Hal., 74

³⁶ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LkiS, 2010. Hal,128

Tabel 2.

Tema-tema Tulisan Gus Dur

No.	Periode	Jumlah	Isi
1.	1970-an	37	Tradisi Pesantren, Modernisasi Pesantren, NU, HAM, Reinterpretasi ajaran, Pembangunan, Demokrasi.
2.	1980-an	189	Dunia pesantren, NU, Ideologi negara (pancasila), Pembangunan, Militerisme, Pengembangan, Masyarakat, Pribumisasi Islam, HAM, Modernisme, Kontekstualisme ajaran, Partai politik.
3.	1990-an	253	Pembaruan ajaran Islam, Demokrasi, Kepemimpinan umat, Pembangunan, HAM, Kebangsaan, Partai politik, Gender, Toleransi Agama Universalisme Islam, NU, Globalisasi.
4.	2000-an	122	Budaya, NU dan partai politik, PKB, Demokratisasi dan HAM, Ekonomi dan keadilan sosial, Ideologi dan negara, Tragedi kemanusiaan, Islam dan fundamentalisme

Sumber : inress (2000:38)

Perkembangan pemikiran di atas bersinggungan erat dengan *political event* yang terjadi dan dirasakan dalam kehidupan Gus Dur, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Diskursus hubungan negara dan Islam menjadi kunci untuk memahami *political*

event selama tulisan itu muncul. Produktivitas menulis Gus Dur, baik yang dipublikasikan ataupun tidak, dapat di lihat pada tabel 3. Dalam tabel ini, bisa sebagai bahan kajian untuk membaca pemikiran politik Gus Dur.³⁷

Tabel 3.

Jumlah Tulisan Gus Dur yang Teramati

Tahun	Jumlah
1970-1980	105
1980-1990	215
1990-2000	80
2000-2005	100
	500

Sumber: incress (2000)

Tabel di atas menunjukkan produktivitas Gus Dur mengkritisi persoalan-persoalan Indonesia. Tulisan tersebut tersebar di berbagai media massa, tulisan-tulisan untuk seminar ataupun dalam kompilasi tulisan dari beberapa buku.

Gus Dur merupakan penulis yang produktif, Ia banyak menulis artikel maupun *essay*, dan sebagian sudah

³⁷ *Ibid.*, Hal. 324

dibukukan. Sebagian karya-karyanya yang telah dibukukan antara lain:

1. *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta, Penerbit: Gramedia. 2015
2. *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian* Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010
3. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* Penerbit : Pt. The Wahid Institute. 2007
4. *Tuhan tidak Perlu Dibela.*, Penerbit: Majalah Amanah. 2014
5. *Sekedar Mendahului Bunga Rampai Kata Pengantar*, Jakarta, Penerbit: Nuansa Cendikia. 2011
6. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural.*,
7. *Kia Nyentrik Membela Pemerintah*, Yogyakarta Penerbit: LkiS. 2010.
8. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta Penerbit: LkiS. 2010
9. *Khasanah Kiai Bisri Syanuri: Pecinta Fokih Sepanjang Hayat*. Jakarta, Penerbit PT PENSIL, 2010
10. *GUS Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, Penerbit: PT KOMPAS. 2007.

C. Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Politik Islam

Kesatrian adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan ciri-ciri karakter Gus Dur yang penuh integritas, kuat, berani tak mengenal takut, tak kenal lelah membela yang benar dan yang lemah, yang selama ini sering dipuja-puji. Dalam berbagai legenda, sifat-sifat inilah yang menjadi karakter ksatria.³⁸

Meski terlahir sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), keterlibatan Gus Dur di organisasi Islam terbesar di Indonesia itu baru terjadi pada tahun 1979. Atau tepatnya setelah berlangsungnya Muktamar NU di Semarang. Sebelumnya, ia memang sudah diminta untuk ikut berperan aktif dalam menjalankan roda jami'iyah NU. Namun, karena merasa permintaan itu berlawanan dengan sikapnya sebagai intelektual publik yang tak berpihak, dua kali ia menolak tawaran untuk bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Ia baru bersedia bergabung dengan NU, setelah kakeknya, Kiai Bisri Syamsuri, meminta untuk ketiga kalinya. Gus Dur tak kuasa lagi menolak dan akhirnya masuk dalam struktural Pengurus Besar NU dengan

³⁸ K.H. Husein Muhammad, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2012. Hal. x

jabatan Khatib Awal atau Sekretaris 1. Sejak itu pula, Gus Dur kembali ke Jakarta dan seterusnya menetap di kota Jakarta.³⁹

Memang sulit untuk melihat bagaimana kesederhanaan menjadi jalan hidup Gus Dur. Tak sekedar penampilan fisiknya, tetapi juga cara berfikir substantif yang terabaikan dalam kalimat “Gitu Saja Kok Repot” yang mengingatkan selalu kembali pada pokok persoalan sehingga segalanya menjadi sederhana.⁴⁰

Kiprah politik Gus Dur dimulai sekitar awal 1980-an. Secara terbuka, Gus Dur menawarkan ide-ide pluralisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain.⁴¹ Dengan kiprah dan perannya di berbagai bidang, kiai, politisi, intelektual, budayawan, dan mantan Presiden. Kiprah politiknya sendiri semakin menjulang ketika secara tegas ia terjun ke dunia politik praksis dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),⁴² hingga mencapai puncaknya pada 1999-2001, saat menjadi

³⁹ Ali Masyakur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Erlangga. Hal., 10

⁴⁰ K.H. Husein Muhammad, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2012. Hal. xi

⁴¹ Ahmad Rofi' Usmani. *Ensiklopedia Tokoh Muslim Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Mizan Media Utama:., 2015. Hal.,

⁴² Asmawi, *PKB, Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999, Hal.10.

Presiden ke-4. Namun, jabatan sebagai Presiden berakhir pada Sidang Istimewa MPR 21 Juli 2001.⁴³

Akar pemikiran politik KH Abdurrahman Wahid sesungguhnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan (*humanisme-insaniyah*) dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Gus Dur, komitmen kemanusiaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan persoalan utama kiprah politik umat Islam di dalam masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Komitmen kemanusiaan itu pada intinya adalah menghargai sikap toleransi dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap keharmonisan sosial (*sosial harmony*). Menurut Gus Dur, kedua elemen asasi tersebut dapat menjadi dasar ideal modus keberadaan politik komunitas Islam di Indonesia.⁴⁴

Kelihaian Gus Dur melakukan gerakan politik memang diakui oleh kawan ataupun lawan. Jabatan Presiden yang diraihnya menjadi ukuran prestasi tersebut. Bagi sarjana politik, pemikiran dan perilaku politik Gus Dur dapat dinilai menjadi khazanah bagi dinamika perpolitikan di Indonesia. Gaya politik yang “*nyeleneh*” dari sosok Gus Dur menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik yang khas ketika melakukan interaksi dan advokasi politik. Gaya tersebut dipandang oleh sebagian ahli

⁴³ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LkiS. 2010., Hal.,2

⁴⁴ Ali Masykur Musa., *Op.,cit.*, Hal 87

politik tentang NU sebagai bentuk *anomali*.⁴⁵ Artinya, Gus Dur memiliki keunikan tersendiri, yang juga kelebihanannya, sebagai daya tawar dihadapan lawan-lawan politiknya. Salah satunya yang patut diperhitungkan dalam sejarah pemikiran politik adalah kemampuannya membangun intelektualisme dan aktivisme sekaligus, yang jarang dilakukan para kiai dilinkungannya. Berjuang melalui politik praktis diiringi dengan perlawanan terhadap “kebodohan” politik itu sendiri dengan intelektualismenya, merupakan gaya Gus Dur.⁴⁶

Menjelang pemilihan Presiden berlangsung, hampir semua teman dekat dan sanak saudara Gus Dur mengutarakan dua alasan berisi keprehatinan mereka mengenai prospeknya menjadi presiden: *Pertama*, presiden yang ke-4 harus mengelola masa peralihan yang penuh gejolak dan kesulitan oleh karena unsur-unsur rezim yang lampau akan berusaha keras untuk menghalangi, dan kalau bisa, menjatuhkannya. Pada saat yang sama, keadaan ekonomi ambruk, masyarakat mulai menunjukkan disintegrasi dan harapan rakyat mengenai demokrasi terlalu

⁴⁵ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 2004. Hal. 100-120. Kondisi “nyeleneh” merupakan ciri khas Gus Dur sebagai pribadi, yang tidak di temukan pada tokoh-tokoh NU sebelumnya, termasuk kakek dan ayahnya Gus Dur sendiri. Akan tetapi, justru karena karekter *anomaly* tersebut, posisi NU menjadi kuat dalam proses *bergaining* dengan negara taupun yang lainnya.

⁴⁶ Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LkiS. 2010., Hal.,2

besar. Oleh karena itu, Presiden yang baru akan mendapat kritikan dan pekerjaannya hampir-hampir tidak dihargai.⁴⁷

Kedua, Gus Dur adalah seorang pemimpin yang eksentrik yang suka membawa caranya sendiri. Walaupun ia mempunyai pandangan jauh kedepan dan karena itu dapat memberikan inspirasi dan menunjukkan kepemimpinan yang jarang dapat dijalankan oleh orang lain, pendekatannya yang *nyeleneh* itu mungkin tidak akan berarti apa-apa untuk mendorong pencalonannya sebagai Presiden. Namun demikian, mengingat keadaan Indonesia saat itu, orang boleh percaya bahwa mungkin pendekatan yang semacam itulah yang diperlukan pada masa peralihan kealam demokrasi. Gus Dur adalah satu dari sedikit orang yang pernah berhadap-hadapan dengan Soeharto selama lebih dari satu dasawarsa dan secara konsisten ia memenangkan pertarungan itu, atau paling tidak ia dapat mengambil strategi mundur agar dapat hidup melakukan perlawanan pada hari lainnya.⁴⁸

Pergulatan pemikiran Gus Dur yang sangat intens dalam dunia politik, membuatnya menjadi bagian dari perpolitikan itu sendiri. Dengan kata lain, Gus Dur bukan saja sebagai aktor politik, baik dalam kapasitas pemikir dan pemain, melain juga

⁴⁷ Greg Barton, *op.cit.*, 375

⁴⁸ Greg Barton, *op.cit.*, 375.

merupakan salah satu produk sistem politik yang berkembang selama ini.⁴⁹

Penolakan Gus Dur terhadap formalisasi, ideologisasi, dan Syari'atisasi itu mendorong untuk tidak menyetujui gagasan tentang negara Islam. Seperti yang sudah sering dinyatakannya, Gus Dur secara tegas menolak gagasan negara Islam. Sikapnya ini didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (*syari'at*) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana negara dibuat dan dipertahankan. Dasar yang dipakai oleh Gus Dur ada dua yaitu. *Pertama*, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui *bai'at* oleh para kepala suku dan wakil-wakil kelompok umat yang ada pada waktu itu. Sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum Muslimin, hendaknya Umar bin Khatab yang diangkat menggantikan posisinya. Ini berarti, sistem yang dipakai adalah penunjukan. Sementara Umar bin Khatab menjelang wafatnya meminta agar penggantinya di tunjuk melalui sebuah dewan ahli yang terdiri dari tujuh orang. Lalu di

⁴⁹ Muhammad A.S Hikam. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas 2000. Hal. 163

pilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar. Selanjutnya, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Tholib. Pada saat itu, Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikan Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk menjadikan kerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon raja dan Sultan dalam sejarah Islam.⁵⁰

Kedua, besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam, juga tak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum Muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), ataukah hanya negara-kota (*city-state*).⁵¹

Memahami pemikiran politik Gus Dur, dengan demikian, memahami sebagian dari dinamika politik Indonesia itu sendiri. Sumbangan pemikirannya bukan saja pada keteguhannya membicarakan tema-tema sentral yang selalu menyertai perkembangan demokrasi, melainkan juga alternatif-alternatif jawaban yang disodorkan olehnya. Alternatif tersebut jelas bukan yang akan memuaskan pihak, tetapi yang penting adalah penemuan dataran-dataran baru yang memungkinkan terjadinya pergerakan-pergerakan yang lebih luwes dan berjangkauan jauh.

⁵⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam anda Islam kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute. 2006. Hal, xvi

⁵¹ *Ibid.*, Hal., xvii

Dengan cara seperti ini, pengembangan kehidupan politik dapat sekaligus perbaikan, tetapi tanpa harus secara dogmatis mengikuti suatu pola baku yang tertutup.⁵²

Terlihat bahwa realitas politik yang ada saat ini di mana terjadi legalisasi ajaran Islam (yang terbatas), bagi Gus Dur adalah suatu indikasi dari negara Islam. Sedangkan dari kalangan Islam lain, hal itu adalah suatu bentuk kompromi antara negara Islam dengan negara sekuler. Kalau Gus Dur menghendaki bentuk “bukan negara Islam dan bukan negara sekuler”, maka tidak melihat alternatif lain kecuali realitas yang ada saat ini. Sedangkan kalau Gus Dur menolak legalisasi ajaran Islam, maka itu berarti dia menyetujui negara sekuler.⁵³

Tidak bisa dipahami bahwa penafsiran ”bukan negara Islam dan bukan negara sekuler” mengandung keharusan untuk menentang legalisasi ajaran Islam secara terbatas. Lebih tidak bisa dipahami lagi, apabila yang mempunyai penafsiran yang berbeda dengan dirinya, oleh Gus Dur disebut sebagai ingin mendirikan negara Islam. Akan lebih bijaksana kalau segala perdebatan tentang negara Islam dihentikan karena hal itu adalah sesuatu yang kontra-produktif dan menimbulkan alergi.

⁵² Muhammad A.S Hikam. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas 2000. Hal. 165

⁵³ Abdurrahman Wahid. *Islam, Negara, dan Demokrasi Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, Jakarta: ERLANGGA:1999, Hal: 137

Tidak perlu ada kekhawatiran dan kecurigaan tentang adanya upaya untuk mendirikan negara Islam dalam pengertian negara yang berdasar Islam di mana ajaran Islam akan menjadi sumber hukum. Bentuk negara yang menerima legalisasi ajaran Islam secara terbatas seperti yang kita jalani sekarang adalah sesuai dengan aspirasi kalangan nasionalis-Islam. Menghilangkan ketentuan Syari'at Islam yang sudah masuk UU berarti mengubah negara kita menjadi negara sekuler, yang akan ditentang oleh semua kalangan nasionalis-Islam termasuk warga NU

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Partai Politik Islam di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak luput dari kemunduran itu. Bahkan, menurut Fazhur Rahman puncak kemunduran intelektual terjadi terutama pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena umat Islam lebih terkonsentrasi untuk perjuangan melawan penjajah, atau karena belum adanya kesadaran tentang betapa pentingnya pembangunan intelektual agar Islam mampu diterjemahkan untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, keadilan, dan politik.¹

Menjelang berdirinya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun modernis, yang berada dalam BPUPKI berjuang agar Islam dijadikan dasar negara di Indonesia. Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang didalamnya mengandung berbagai agama. Perjuangan nyata umat Islam adalah dengan mengemukakan kata syariat Islam dalam

¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Peraturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal. 32

dasar negara. Dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, ternyata hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik Islam.²

Masa Orde Lama, menurut Miriam Budiardjo ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, serta meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Pada masa ini partai politik tidak lagi bebas berekspresi sebagaimana pada masa demokrasi liberal karena ruang gerak dari partai politik sangat dibatasi. Melalui Penpres pada tahun 1959 Soekarno memangkas partai politik yang terdapat pada masa itu hingga tersisa sepuluh partai politik termasuk NU dan PNI serta golongan komunis. Tidak hanya membubarkan partai politik yang tidak termasuk kriteria dalam Penpres tersebut, Soekarno juga menghapuskan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden.

Masa Orde Baru (1966-1998) partai politik juga mengalami kemunduran akibat pembatasan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Walaupun pada awal berkuasanya rezim Orde Baru sistem kepartaian kita sempat menggunakan sistem

² Heni Wahyu Widayati, *Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan*, Jurnal Dakwah, Vol, X No. 2, Juli-Desember, 2009, hal 215.

multipartai, namun pada tahun 1973 jumlah partai secara drastis dikurangi menjadi tiga partai politik melalui fusi atau penggabungan partai politik. Pemerintah melalui UU No. 3 Tahun 1973, menekan jumlah partai politik yang pada awalnya cukup banyak menjadi 3 kekuatan sosial politik yang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta Golkar. Penataan tersebut menyebabkan partai politik tidak mampu untuk menyalurkan aspirasi rakyat karena dominannya peran pemerintah. Hal ini terlihat dari hasil pemilu yang selalu dimenangkan oleh Golkar yang merupakan partai pemerintah. Sedangkan, dua partai lainnya, yaitu PPP dan PDI hanya dijadikan aksesoris demokrasi semata.

Era Reformasi, partai politik seolah terlepas dari semua belenggu yang mengekang selama ini. Rezim Orde Baru yang otoriter kemudian berganti kepada reformasi yang demokratis. Presiden pertama pada Era reformasi, yaitu Presiden B.J. Habibie akhirnya menerapkan kembali sistem multipartai. Selain itu, partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Antusiasme masyarakat dalam berpolitik waktu itu sungguh luar biasa, pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat mengikuti Pemilu. Namun, kondisi partai politik pada masa ini tetap meninggalkan banyak catatan. Salah satunya adalah masalah ideologi partai. Keasyikan

partai politik untuk menghadapi pemilu membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi *catch-all* dengan berusaha merangkul semua basis pemilih. Menurut Giovanni Sartori keadaan sistem kepartaian yang seperti ini dapat disebut sebagai proses depolarisasi yang pada gilirannya akan mencapai suatu konsensus sistem multipolar yang cenderung bersifat sentrifugal.³

Kemampuan Gus Dur melakukan gerakan politik diakui oleh kawan dan lawan yang diperlihatkan oleh keberhasilannya meraih jabatan presiden. Bagi sarjana politik, pemikiran dan perilaku Gus Dur dapat dipandang sebagai khazanah dalam dinamika pemikiran politik di Indonesia. Gayanya yang *nyeleneh* menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik saat melakukan interaksi dan advokasi politik yang untuk sebagian orang NU dinaggap sebagai anomali.⁴

Sikap *nyeleneh* dan anomali itu merupakan keunikan sekaligus kelebihan sebagai nilai-tawar dihadapan politisi lain. Salah satu kelebihan Gus Dur yang patut diperhitungkan adalah kemampuan membangun intelektualisme dan aktivisme sekaligus yang sangat jarang dilakukan oleh ulama klasik yang

³ Murhadam Labolo. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Teori Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2015 Hal 105.

⁴ *Ibid.* Hal 85

melingkunginya. Ia berjuang melalui politik praktis⁵ sambil melakukan perlawanan terhadap kebodohan politik itu sendiri dengan intelektualismenya.⁶

Gus Dur mempunyai lima traktat dalam pemikiran, yakni: (1) dinamisasi dan modernisasi pesantren (1973) yang mengusung ide pendekatan ilmiah model *Marxian* terhadap situasi politik Indonesia, (2) pengenalan islam sebagai sistem kemasyarakatan (1978) yang berisi semangat mengembangkan Islam klasik serta bagaimana syari'ah diimplementasikan dalam menghadapi masalah-masalah mutakhir, (3) Islam dan militerisme dalam lintasan sejarah (1980) yang berisi ide perlawanan kultural model *Marxian* terhadap kekerasan, (4) konsep kenegaraan dalam islam (1983) yang berisi ide sekuralistik dan integralistik pemikiran Gus Dur tentang hubungan Agama dan Negara, (5) Pribumisasi Islam (1983) yang berisi pendekatan humanisme dalam politik dan keagamaan.⁷

Gus Dur, seperti dikemukakan oleh Douglas E. Ramage, sebuah masyarakat Islam tidak perlu ada di negeri ini.

⁵ Politik praktis adalah suatu kegiatan, aktivis atau gerakan dari satu orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi pandangan, pendapat (opini) masyarakat tentang suatu keputusan/kebijakan pemerintah, atau bahkan dapat merubah keputusan pemerintah

⁶ Mahfud MD. *Islam, Politik, dan Kebangsaan*, LkiS Yogyakarta, PT. LkiS Printing Cemerlang. 2010.

⁷ Mahfud MD. *Islam, Politik, dan Kebangsaan*, LkiS Yogyakarta, PT. LkiS Printing Cemerlang. 2010. Hal 85-86

Yang harus diperjuangkan oleh umat dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia dimana “*umat Islam yang kuat dalam pengertian berfungsi dengan baik*” sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain.⁸

Akar pemikiran politik Abdurrahman Wahid lainnya adalah penguatan *civil society*. Ia berpendapat, paradigma baru yang harus dikembangkan oleh umat Islam adalah mengambil titik masuk strategis (*strategic entry points*), Yaitu pembentukan *civil society* (pemberdayaan rakyat bawah). Pengembangan orientasi *civil society* ini sejalan dengan NU setelah kembali ke khittah 1926. Menurut Muhammad AS. Hikam, bagi NU *civil society* sejalan dikarenakan: *Pertama*, NU tak lagi hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga *nahdliyin* saja, tetapi diperluas hingga menyangkut kepentingan bangsa. *Kedua*, NU mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah *civil society* yang mendirikan kini menjadi salah satu komitmen utama perjuangannya. *Ketiga*, NU pasca khittah berniat menitik beratkan geraknya pada level

⁸ Gerg Fealy. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LkiS, Yogyakarta, 1996. Hal. 206

masyarakat dan ditujukan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan dirinya.⁹

Ketiga akar pemikiran politik Abdurrahman Wahid tersebut didasari oleh neo-tradisional Islam yang dipahaminya sejalan dengan modernisme tetapi tetap mempunyai dasar pijakan transendental kepada Tuhan. Dengan pandangan ini, kehidupan sosial kenegaraan harus dicermati dengan jalan melakukan penyesuaian dan pembaruan ajaran Islam dalam aplikasi di dalam dunia nyata apabila Islam tetap cair dan relevan di alam modern.¹⁰

Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasannya yaitu: 1). Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik di Indonesia; dan 2). Pribumisasi Islam. Gagasan ini dapat dinilai bahwa Abdurrahman Wahid, bukanlah menghalangi Islam memainkan peran secara signifikan dalam Negara, akan tetapi setiap kelompok agama diharapkan memberikan peran yang sama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, ia percaya bahwa masyarakat Muslim mempunyai hak yang sama untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai ajaran agamanya.

⁹ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta, Penerbit: Erlangga. Tahun 2010. Hal 88.

¹⁰ *Ibid.* 89.

Seperti pernah dikatakan Gus Dur, NU bukanlah partai politik, melainkan bisa melakukan gerakan politik dalam hal-hal tertentu, terutama politik yang sifatnya inspiratif. Jadi gerakan politik tak harus diwadahi oleh partai politik, tetapi bisa dilakukan oleh institusi-institusi atau tokoh-tokoh yang bukan dari partai politik. Dalam konteks inilah kita bisa melihat bahwa Gus Dur, sebelum memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sudah berkiprah sebagai politikus dengan modal talenta politik yang luar biasa. Dan dalam konteks itu pula kita bisa memahami pernyataan Gus Mus bahwa Gus Dur adalah politikus ulung, meski ketika itu tidak memimpin partai politik. Adik Gus Dur, Salahuddin Wahid, yang akrab dipanggil Gus Sholah, pernah mengatakan bahwa sebagai adik, dia kagum kepada Gus Dur karena mempunyai modal sosial dan politik yang tak habis-habis meski digoyang dari berbagai sudut.¹¹

Bercerai-berainya partai Islam memberikan pertanda bahwa umat Islam Indonesia memang sulit untuk bersatu dalam satu partai politik atau satu wadah organisasi. Secara tidak langsung hal ini juga memberikan isyarat bahwa umat Islam Indonesia akan selalu berseberangan antara satu dengan yang lainnya, sekalipun memiliki satu kitab suci dan nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. namun, dalam pilihan dan artikulasi

¹¹ Mahfud MD. *Islam, Politik, dan Kebangsaan*, LkiS Yogyakarta, PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010. Hal 21

politik tidak akan bisa dipersatukan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini pula membuktikan bahwa politisi muslim dan artikulasi politik umat Islam tidak akan sebesar dan membahayakan yang dikhawatirkan banyak orang tentang Islam politik Indonesia akan membesar dan menguasai Indonesia.

Umat Islam yang tercerai-berai dalam berbagai partai politik dengan karakteristiknya sendiri, seperti PSII, Masyumi Baru, PBB, PKB, PKNU, PUI, Partai SUNI dan seterusnya memberikan penjelasan bahwa Islam Indonesia merupakan Islam yang “penuh warna” tidak tunggal, sekalipun mazhab utama adalah SUNI Asyariyah, bahkan Muhammadiyah dan NU sebagai mazhab terbesar Islam Indonesia pun akhirnya harus bercerai-berai dalam urusan partai politik. Ada siyalemen bahwa umat Islam Indonesia hanya akan bersatu dalam hal menyelenggarakan haji yakni datang ke Mekkah al Mukaromah, tetapi untuk urusan Idul Fitri akan banyak perbedaan apalagi urusan pilihan partai politik. Masing-masing umat Islam memiliki kiblatnya sendiri, entah bermazhab Suni, Syiah, sufisme ataupun yang lainnya. Inilah bentuk unik dan cerai-berainya Islam di Indonesia.

Partai-partai Islam dapat dikatakan sibuk dengan konflik internal yang menyita perhatian dan energi untuk membangun sebuah partai yang transparan, partai yang mandiri dan partai yang dapat dikatakan kuat. Kita lihat perkelahian antara politisi PAN yang berlatarbelakang Muhammadiyah, sehingga memunculkan

PMB. Perkelahian internal PKB yang memunculkan ada dua PKB sekalipun akhirnya pemerintah memenangkan PKB Muhaimin Iskandar dan PKB Abdurrahman Wahid membuat partai baru PKBN (Partai Kebangkitan Nusantara) tetapi akhirnya tidak lolos di Departemen Kehakiman dan Depdagri untuk Pemilu 2014. PPP ribut sehingga memunculkan PBR pimpinan KH Zainudin MZ almarhum sekalipun akhirnya Zainudin MZ kembali pada PPP. Demikian seterusnya yang terjadi dalam tubuh partai Islam rebutan dalam tubuhnya sendiri sehingga mencerminkan kalau politisi muslim sebenarnya tidak tahan bantingan alias ingin berkuasa.

Menurut, Gus Dur partai politik adalah sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membeda-bedakan asal-usul, suku, ras, golongan, agama, dan profesi. Dan sebagai aspirasi rakyat untuk mewujudkan hak-hak sipil dan politik rakyat. Juga sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

B. Analisis Dampak Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Partai Politik Islam Terhadap Masa Depan Perpolitikan di Indonesia.

Perkembangan Islam di Indonesia itu tidak ditandai dengan upaya-upaya yang berciri kekerasan. Di sini Islam

berkembang tanpa kekerasan pada umumnya. Perkembangan itu tidak dilakukan oleh orang-orang profesional. Maka demikian, agama ini telah mengalami perkembangan yang cukup mantap dan mengesankan, sehingga sampai sekarang sebagian besar penduduk kawasan ini telah menjadi penganut agama Islam.¹²

Konteks agenda-agenda untuk mempertimbangkan situasi lokal dan setempat, Gus Dur menyuarakan gagasan tentang (1) Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosio-kultural dan politik di Indonesia¹³ dan (2) Pribumisasi Islam.¹⁴

Dimensi *pertama* gagasannya adalah seruan kepada rekan-rekannya sesama Muslim untuk tidak menjadikannya Islam sebagai suatu ideologi alternatif terhadap konstruk negara bangsa Indonesia yang ada sekarang. Dalam pandangannya sebagai satu komponen penting dari struktur sosial Indonesia, Islam tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi yang bersaing, *vis a vis* komponen-komponen lainnya. Namun Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi tatanan sosial, kultural dan politik negara terutama karena corak sosial, kultural

¹² Alfian Nazarruddin Sjamsudin. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1991. Hal,65

¹³ Abdurrahman Wahid, *Masa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta: Prisma. Hal. 3

¹⁴ Abdurrahman Wahid. *Pribumisasi Islam dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu'in Shaleh Ed. Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta. P3M, 1989, hal 81-86

dan masyarakat politik kepulauan nusantara yang beragam. Oleh karena itu, upaya menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif atau “pemberi warna tunggal” hanya akan membawa perpecahan kepada masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Aspek kedua di gagasan Gus Dur adalah mengingatkan mengenai perlunya kaum Muslim untuk mempertimbangkan situasi sosial lokal dalam rangka penerapan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, diharapkan bahwa Islam Indonesia tidak tercabut dari konteks lokalnya sendiri, yakni kebudayaan, tradisi dan lainnya. Ketika menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pribumisasi Islam, ia menulis, Pribumisasi Islam bukanlah jwanisasi atau sinkritisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal Indonesia di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukan meninggalkan norma-norma keagamaan demi budayua, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan menggunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Qur’an).¹⁶

Gus Dur dalam kepemimpinannya di NU mempertegas kembali komitmen perjuangan NU dengan meletakkannya secara

¹⁵ Tafik Ahmad, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005 174

¹⁶ *Ibid.*, Hal 176

proposional. Wujud tindakan itu, NU di khittahkan ke 1962, pada waktu Mukhtamar di Situbondo 1984. Kembalinya NU kepada kerangka landasan semula sebagai ormas keagamaan tidak mudah, karena menurut sebagian pengamat, NU sudah lebih tiga puluh tahun malang melintang di arena politik praktis. Nostalgia NU sebagai kekuatan politik telah dikubur dalam-dalam oleh Gus Dur ia berharap dengan NU kembali sebagai wadah yang memperjuangkan nilai keagamaan, kualitas SDM umat Islam akan kian membaik sesuai tuntunan zaman.¹⁷

Abdurrahman Wahid dan M. Amin Rais merupakan dua figur yang turut memberikan peran penting dalam gerak reformasi memang tidak bisa diabaikan. Tetapi Abdurrahman Wahid maupun Amien Rais tampaknya masih berkenan menjadi pemimpin partai, sekali pun dikatakan karena golongan kolega-kolegnya di NU untuk Abdurrahman Wahid, dan karena dorongan dari Majelis Amanat Rakyat (MARA) untuk Amien Rais yang kemudian berkiprah di PAN dan melepaskan jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah hasil Mukhtamar Nangrou Aceh Darussalam tahun 1995. Dalam sisa kepemimpinannya digantikan Ahmad Syafi'i Ma'arif, teman dekatnya Chicago semasa belajar pada intelektual muslim Fazhur Rahman asal Pakistan. Syafi'i akhirnya terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua

¹⁷ Zainal Arifin Thoha. *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*. Yogyakarta Gramedia, 2001. Hal 132

Umum PP Muhammadiyah hasil Muktamar Jakarta tahun 2000-2005.¹⁸

Gus Dur selain berkecimpung di organisasi sosial keagamaan terbesar negari ini, yaitu NU, dia juga menapaki jalan perpolitikan Indonesia. Dalam menapaki karir politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan kendaraan politik Gus Dur. PKB merupakan partai politik yang didirikan pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 H/23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para Kiai NU, yaitu KH. Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, Gus Dur, KH. Mustofa Bisri, dan KH. A. Muchith Muzadi. Partai ini menjadi representasi dan juga sebagai wadah aspirasi warga NU dalam perpolitikan Indonesia. Namun PKB bukanlah partai khusus untuk warga NU. Partai ini terbuka bagi kader-kader yang kompeten serta mempunyai komitmen tinggi membangun negara Indonesia.

Gus Dur sebagai politisi ulung menjalani lika-liku perpolitikan Indonesia. Dan ini merupakan tangga bagi dia bebas untuk menuju kursi ke-Presidenan. Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur bersama Megawati, Amien Rais, dan Sultan Hamengkubowono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan Presiden.

¹⁸ Zuly Qodir, *op.cit.* 203

Beberapa hal sebenarnya Abdurrahman Wahid, sebelum mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), seperti kita ketahui dikategorikan sebagai seorang ulama pluralis, neo-modernis oleh Greg Barton bahkan Robert Hefner, hanya saja setelah mendirikan PKB, Abdurrahman Wahid energinya terkuras habis untuk menyelesaikan konflik internal NU dan PKB. Konflik internal NU dan PKB bahkan semakin kentara dan meruncing sehingga terjadi polarisasi pengikut Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi dalam tubuh NU. Hal ini tentu saja berpengaruh pada warga nahdliyin dan sebagian Islam Indonesia. Sebagian menyangkan Abdurrahman Wahid membentuk partai politik, tetapi sebagian bersikap membela karena itulah bentuk pendidikan politik yang paling nyata dari Abdurrahman Wahid untuk mendewasakan NU dan umat Islam dalam berpolitik. Abdurrahman Wahid dalam posisi seperti ini masih ditempatkan sebagai demokrat dan aktivis Islam yang inklusif, ketimbang Amien Rais yang mendirikan dan memimpin PAN. Amien Rais dikatakan sebagai tokoh muslim sektarian dan kurang demokratis, sebab memaksa Muhammadiyah mendukung pencalonan dirinya pada Pemilu Presiden tahun 2004.¹⁹

Indonesia saat masuk dalam era reformasi atau menjelang pemilu tahun 1999 Gus Dur kembali mengubah cakrawala

¹⁹ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Hal 202

berpikrnya mengenai keterlibatan NU dengan politik. Tanpa melalui muktamar, NU di bawah kepemimpinan abdurrahman Wahid kembali masuk gelanggang politik, yang menurutnya tidak ada kaitannya dengan NU. Namun di sisi lain, ia menyatakan PKB merupakan anak kandung NU dan setiap terdapat persoalan dalam PKB para kiai langitan NU senantiasa dilibatkan dalam memecahkan persoalan partai. Kenyataan ini membuat NU tidak sesuai lagi dengan khittah 1926 sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Partai Kebangkitan Bangsa mengantarkan Gus Dur ke Krusi Presiden, walaupun hanya berlangsung tidak sampai dua tahun, dan jabatannya sebagai Pimpinan NU digantikan oleh K.H. Hasyim Muzadi. Pada Pemilu 2004 melalui PKB ia berusaha untuk kembali ke istana.

Pemilu jika kita perhatikan sejak tahun 2004, Pemilu kedua pasca Orde Baru diselenggarakan, sampai dengan Pemilu 2009, terdapat gejala yang dapat dikatakan sangat berbeda dengan sebelum Orde Baru tumbang oleh reformasi kaum sipil. Kalangan Islam tampak semakin percaya diri dalam mengartikulasikan minat politiknya, sehingga sering dikatakan inilah era “kebangkitan Islam politik”, karena selama lebih dari tiga dekade Islam politik dipaksa tiarap, bahkan Muhammad Natsir pernah menyatakan bahwa Islam politik bagaikan “kucing Kurap” yang diperlakukan kurang sopan, tidak dihargai sehingga bak

pesakitan.²⁰ Akan tetapi benarkah terjadi kebangkitan Islam politik pasca reformasi.

Sementara itu, pada era reformasi bisa disaksikan kegagalan sebagian partai Islam menghindarkan diri dari konflik dan perpecahan internal. Fenomena Partai Bintang Reformasi, salah satu parpol Islam yang pernah duduk di DPR, adalah produk dari konflik internal PPP. Konflik internal yang sama berlangsung ditubuh partai-partai Islam lainnya yang kemudian melahirkan partai baru yang mengerus suara partai induk. Konflik antara Abdurrahman Wahid dan Muhaemin Iskandar dalam PKB misalnya, tidak hanya membuat sebagian pemilih tradisional PKB pindah ke parpol lain, tetapi juga berdampak pada konsolidasi internal partai itu sendiri.

Salah satu problem yang dihadapi oleh parpol Islam di Indonesia adalah melembaganya polarisasi politik yang akhirnya berkembang menjadi polarisasi, dan bahkan konflik kepemimpinan. Polarisasi politik dan kepemimpinan tersebut cenderung mengikuti garis aliran pemikirannya yang berkembang bersamaan dengan tumbuhnya organisasi-organisasi Islam, baik yang bersifat sosial kemasyarakatan maupun yang kemudian berubah menjadi organisasi politik. Secara umum polarisasi politik dan kepemimpinan tersebut terbelah kedalam dua

²⁰ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Hal 285

kecenderungan, yaitu kepemimpinan Islam tradisional yang berbasiskan kalangan NU, dan kepemimpinan Islam modernis yang berpusat di lingkungan Muhammadiyah.²¹

Kondisi politik yang dicerminkan oleh para elit politik kita saat ini, memberikan kita sebuah kepaahaman tentang apa yang terjadi dalam wilayah politik masa depan serta bagaimana masa depan suatu Bangsa yang sedang mengalami masa transisi, seperti sekarang ini.

Kecenderungan penurunan semakin terlihat dari hasil pemilu 2009, di mana gabungan suara partai Islam hanya memperoleh 25,94%. Jumlah partai Islam yang terus bertambah sebagai peserta pemilu mungkin menjadi penyebabnya. Pada pemilu 2009, jumlah partai Islam sebagai peserta pemilu sebanyak sembilan partai dari 44 partai peserta pemilu. Naik turunnya suara partai Islam kembali terjadi pada Pemilu 2014, di mana perolehan kumulatif suara partai Islam tidak sebanyak pada pemilu 1999 dan 2004, hanya meningkat sekitar 5 % dari Pemilu 2009, dengan perolehan suara 31,38 % suara. Padahal, jumlah peserta pemilu lebih sedikit dibanding Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik, lima diantaranya adalah partai Islam. Setidaknya partai Islam yang lolos sebagai peserta pemilu akibat dari ketentuan diambang batas parlemen

²¹ Moch. Nurhasim, *Masa Depan Partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. Hal., 275

sebesar 2,5 % pada Pemilu 2009 dan semakin beratnya persyaratan parpol sebagai peserta Pemilu 2014. Perolehan suara partai Islam selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.

Perolehan Suara Partai Islam pada Pemilu Era Reformasi.

Pemilu	Partai Islam		Partai Non-Islam (Nasionalis)	
	Jumlah parpol peserta pemilu	Perolehan suara (%)	Jumlah parpol peserta pemilu	Perolehan suara (%)
1999	19	37,59	29	62,41
2004	7	38,54	17	61,46
2009	9	25,94	35	74,06
2014	5	31,39	7	68,61

Sumber: diolah dari data KPU

Tabel di atas menggambarkan bahwa perolehan suara kumulatif partai Islam di era reformasi yang paling tinggi terjadi pada Pemilu 2004 dan 1999. Pada pemilu-pemilu selanjutnya justru cenderung mengalami flektuasi atau turun naik, khususnya turun signifikan pada Pemilu 2009 (12,6%). Akan tetapi, pada Pemilu 2014 mengalami kenaikan (5,45%). Dari pemilu-pemilu

era reformasi, selain memperlihatkan silih bergantinya kehadiran partai berideologi Islam juga menunjukkan minimal ada empat partai Islam yang relatif memiliki dukungan sehingga lolos *electoral threshold* (ET) dan *parliamentary threshold* (PT). Keempat partai tersebut adalah PPP, PAN, PKB, dan PKS. Sisanya seperti Partai Bulan Bintang yang terakhir lolos sebagai peserta Pemilu 2014 justru tidak memperoleh dukungan yang signifikan sehingga tidak lolos PT. Hal itu menunjukkan bahwa secara riil politik, keempat partai Islam itulah yang relatif mampu bertahan dalam dinamika pemilu-pemilu di era reformasi sejak Pemilu 2009 hingga 2014.

Tabel 5.

Perolehan Suara Partai Islam pada Pemilu 1999-2014

Parpol	1999**	2004**	2009**	2014**	Keterangan
PPP	10,7	8,16	5,33	6,53	Fluktuatif, cenderung menurun (1999-2009), meningkat sedikit di 2014
PKB	12,60	10,61	4,95	9,04	Fluktuatif, cenderung menurun (1999-

					2009), meningkat signifikan di 2014
PAN	7,11	6,41	6,03	7,57	Fluktuatif, cenderung menurun
PBB	1,93	2,62	-	-	Menurun
PK/PK S	1,35	7,20	7,89	6,79	Cenderung meningkat (meningkat tajam di 2004), menurun sedikit di 2009
PBR	-	2,60	-	-	Tidak mampu bertahan
PNU	0,64	-	-	-	Tidak mampu bertahan
PSII	0,35	-	-	-	Tidak mampu bertahan
PKU	0,28	-	-	-	Tidak mampu bertahan
Masyu	0,43	-	-	-	Tidak mampu

mi					bertahan
----	--	--	--	--	----------

Sumber: diolah dari data KPU.

“yang dihitung hanya parpol yang memperoleh kursi parlemen, dimulai sejak Pemilu 1999.

** angka dinyatakan dalam persen

Walaupun keempat partai tersebut tetap eksis sebagai peserta pemilu di era reformasi, namun kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa agregat perolehan suara partai-partai Islam jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara partai-partai yang berideologi non-agama seperti Demokrat, Golkar, PDIP dan Gerindra. Dari empat kali pemilu era reformasi, kecenderungan dukungan terhadap partai Islam tidak sebesar yang diharapkan

Oleh karena itu, analisis terhadap masa depan partai Islam kedepan amat diperlukan dalam rangka memberikan gambaran yang objektif mengenai keberadaan partai Islam dan pergeseran perolehan suara mereka. Selain untuk mengisi kekosongan literatur hasil-hasil studi sebelumnya yang hanya memfokuskan keberadaan partai-partai Islam secara tidak utuh, karena umumnya kajian yang pernah dilakukan hanya fokus pada perolehan suara partai pada satu pemilu dan tidak mencoba memberikan analisis yang komprehensif berkaitan dengan volatilitas elektoral partai Islam dari pemilu ke pemilu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam

mengenai volatilitas elektoral partai politik Islam, khususnya empat partai yaitu PKB, PPP, PKS dan PAN, karena hanya keempat partai Islam tersebut yang tetap bertahan pada empat pemilu era reformasi dan memiliki wakil di parlemen. Sisanya, seperti PBB justru tidak lolos PT, demikian juga dengan partai-partai Islam yang pernah berdiri, sebagian besar tinggal papan nama.

Beberapa penyebab yang dapat dikemukakan sebagai bentuk kegagalan partai Islam pada pemilu antara lain:

Pertama, partai Islam dalam praktik politiknya tidak menunjukkan perbedaan yang tegas dibandingkan partai non-ke-Islaman. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sama-sama dilakukan oleh para politisi muslim baik diparlemen ataupun di birokrasi. Jika dalam survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Independen semacam lembaga Survei Nasional, *Tranparacy Internasional* dan *Transparacy Indonesia* menempatkan lembaga politik Indonesia semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang *notabene* adalah perkumpulan para politisi termasuk politisi muslim sebagai lembaga terkorup di Indonesia bersama lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, partai Islam tidak memiliki pembelaan yang jelas pada orang kecil yang jumlahnya jauh lebih besar dari dibandingkan dengan elite muslim dalam partai oarang-orang

kecil yang jumlahnya semakin bertambah dalam, kemiskinan tidak secara khusus mendapatkan perhatian khusus partai Islam.

Ketiga, partai Islam sama-sama berebut suara dalam kolom yang sama, sehingga tidak ada suara yang didapatkan dari lumbung suara lainnya. Hal ini menandakan bahwa partai Islam adalah partai eksklusif (hanya bisa bergerak dan bermain) dalam lingkungan umat Islam. Itu pun dapat dikatakan yang masih satu aliran, seperti NU atau Muhammadiyah. Betapa kesulitan PKB bermain di Muhammadiyah, PAN di NU, PK di Kristen, apalagi PPP, PBB, dan PBR, PKS memang telah mengubah dirinya menjadi Partai Kita Semua, tetapi tetap saja tidak signifikan dalam perolehan suara Pemilu.

Keempat, eksklusifisme dalam berideologi dan berpolitik bertabrakan dengan inklusivisme yang berkembang dimasyarakat Indonesia. Dalam konteks ini sebenarnya aktivitas dan gerakan kelompok inklusivis dapat dikatakan berhasil untuk membendung ideologi politik eksklusif karena masyarakat kemudian tidak menjatuhkan pilihannya pada partai eksklusif.

Menurut penulis, munculnya partai-partai berasaskan Islam, maka hal ini bisa dikatakan terjadi kebangkitan Islam politik Indonesia pasca reformasi. Sebab kita ketahui partai Islam yang berdiri pasca reformasi mencapai 15 buah partai, sekalipun akhirnya berguguran saat mengikuti Pemilu yang menetapkan

batas minimal perolehan suara 2.5%. dari 15 buah Partai Politik yang dapat bertahan sampai Pemilu 2004 tidak lebih dari 5 partai politik. PPP, PBB, PKS, PBR, dan PPNU. Pada Pemilu 1999 kita perhatikan partai Islam terdiri tujuh partai yakni PPP, PBB, PK, PBR, PPNU, Masumi Baru dan PSII. Sementara pada pemilu tahun 2009 partai Islam kembali menjadi tujuh yakni, PPP, PBB, PMB, PBR, PKNU, dan PPNU. Jumlah menyusut dan terus menyusut.²²

Abdurahman wahid (Gus Dur) juga seorang manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kelebihan terhadap pemikiran politiknya waktu jadi ketua umum PBNU, PKB dan Presiden. Maka dampak pemikiran politik Gus Dur bagi partai politik Islam PKB maupun Partai Islam yang lainnya seperti PPP, PKS, PBB, dan PAN. Ini memiliki dampak negatif dan positif sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia. Dampak positif pemikiran politik Gus Dur terhadap partai Islam antara lain:

1. Gus Dur mengajarkan bahwa pluralisme beragama, dan pemahaman keberagaman beragama yang ada di masyarakat di Indonesia sebagai sesuatu yang harus ditoleransi.

²² Zuly Qodir., *Op.,. Cit.*, hal 286

2. Gus Dur datang yang bisa mengayomi minoritas, menggalang kekuatan dengan kelompok sekuler, dan menyerap banyak kelas sosial.
3. Pada masa pemerintahan Gus dur politik yang demokratis mulai tampak terwujud. Hal ini dapat terlihat tidakan Gus Gur penghapusan peraturan yang merugikan kaum minoritas
4. Gus Dur menetapkan Pancasila sebagai asas partai. Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Sedangkan dampak negatif pemikiran politik gus Dur terhadap partai politik Islam antara lain sebagai berikut:

1. Gus Dur cenderung bersifat sembarangan. Dia cenderung tidak teliti dan sering tampak ceroboh dalam membuat pernyataan di depan umum. Hal tersebut menimbulkan keguncangan situasi politik dalam negeri sehingga masyarakat kurang antusias dengan gaya pemerintahan Gus Dur.
2. Dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungannya. Simpati berubah menjadi antipati, puncaknya Gus Dur pun dilengserkan oleh MPR dan dipaksa keluar dari Istana Negara.

3. Akibat restrukturisasi lembaga pemerintahan menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil atau sering terjadi pertentangan antar partai bahkan pertentangan intern partai.
4. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalah pahami oleh banyak kalangan.
5. Gus Dur bukanlah tokoh dari partai yang memenangkan pemilu. Partai yang mengusung pada saat itu adalah PKB , bukan partai dengan suara terbanyak dan Proses terpilihnya Gus Dur pun terbilang unik. Hasil dari loby-loby politik yang akhirnya membuat Gus Dur dipilih sebagai presiden. Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Gus Dur ia “terpaksa” merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan *platform* (visi\misi) dengan dirinya.

Masa depan perpolitikan Indonesia dalam pemikiran Gus Dur sangat tergantung pada moralitas pribadi para politisi Indonesia itu sendiri, dimana itu sudah terbukti pada apa yang pernah ditulis oleh Prof. Frans Magnis-Suseno, beliau menulis bahwa Gus Dur mewujudkan Islam yang percaya diri, positif , terbuka, dan ramah. Apabila perpolitikan suatu bangsa berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pandangan strukturalisme ekstrim, maka moralitas pribadi para politisilah yang menjadi pacuan utama kemajuan suatu bangsa, dikarenakan kemajuan bangsa tergantung dari baik dan buruknya moralitas

politisi. Sedangkan apabila suatu bangsa berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pandangan pesimisme pragmatis, maka mereka melihat posisi politik ini sebagai sebuah bisnis kotor, dimana mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur dan “*sepi ing pamrih*”. Dalam analisis, sangat tidak mungkin kita mencari air yang jernih ditengah banjir yang melanda.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pemikiran partai politik Islam Abdurrahman Wahid (gus Dur), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Islam menurut Abdurrahman Wahid Ada lima traktat pemikiran Gus Dur, yakni : (1) dinamisasi dan modernisasi pesantren (1973) yang mengusung ide pendekatan ilmiah model *Marxian* terhadap situasi politik Indonesia, (2) pengenalan islam sebagai sistem kemasyarakatan (1978) yang berisi semangat mengembangkan Islam klasik serta bagaimana syari'ah diimplementasikan dalam menghadapi masalah-masalah mutakhir, (3) Islam dan militerisme dalam lintasan sejarah (1980) yang berisi ide perlawanan kultural model *Marxian* terhadap kekerasan, (4) konsep kenegaraan dalam islam (1983) yang berisi ide sekuralistik dan integralistik pemikiran Gus Dur tentang hubungan Agama dan Negara, (5) Pribumisasi Islam (1983) yang berisi pendekatan humanisme dalam politik dan keagamaan. Akar pemikiran politik KH Abdurrahman Wahid sesungguhnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan (*humanisme-*

insaniyah) dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Gus Dur, komitmen kemanusiaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan persoalan utama kiprah politik umat Islam di dalam masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Komitmen kemanusiaan itu pada intinya adalah menghargai sikap toleransi dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap keharmonisan sosial (*sosial harmony*). Menurut Gus Dur, kedua elemen asasi tersebut dapat menjadi dasar ideal modus keberadaan politik komunitas Islam di Indonesia.

Menurut, Gus Dur partai politik adalah sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membeda-bedakan asal-usul, suku, ras, golongan, agama, dan profesi. Dan sebagai aspirasi rakyat untuk mewujudkan hak-hak sipil dan politik rakyat. Sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

2. Maka dampak dari pemikiran politik Gus Dur bagi partai politik Islam sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia, *Pertama*, sosoknya yang kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalah pahami oleh banyak kalangan. *Kedua*, kecenderungan bersifat sembarangan. Dia cenderung tidak teliti dan sering tampak ceroboh dalam membuat pernyataan di depan umum. Sedangkan dampak

positifnya, *Pertama*, Gus Dur mengajarkan bahwa pluralisme beragama, dan pemahaman keberagaman beragama yang ada di masyarakat di Indonesia sebagai sesuatu yang harus ditoleransi. *Kedua*, Gus Dur datang yang bisa mengayomi minoritas, menggalang kekuatan dengan kelompok sekuler, dan menyerap banyak kelas sosial. *Ketiga*, Gus Dur menetapkan Pancasila sebagai asas partai. Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Masa depan partai politik Islam di Indonesia menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perpolitikan Indonesia sangat tergantung pada moralitas pribadi para politisi Indonesia itu sendiri, dimana itu sudah terbukti pada apa yang pernah ditulis oleh Prof. Frans Magnis-Suseno, beliau menulis bahwa apabila perpolitikan suatu bangsa berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pandangan strukturalisme ekstrem, maka moralitas pribadi para politisilah yang menjadi pacuan utama kemajuan suatu bangsa, dikarenakan kemajuan bangsa tergantung dari baik dan buruknya moralitas politisi. Sedangkan apabila suatu bangsa berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pandangan pesimisme paragmatis, maka mereka melihat

posisi politik ini sebagai sebuah bisnis kotor, dimana mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur dan “*sepi ing pamrih*” dianggap sama dengan mencari perawan dilokalisasi “pelacuran”. Dalam analisis, sangat tidak mungkin kita mencari air yang jernih di tengah banjir yang melanda.

B. SARAN

Demikian penyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah WT, agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umunya untuk semua pemerhati politik Islam. *Wa Allahu A'alam*

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary Muhammad Tahrir. *Negara Hukum, (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1992
- Badrun Ubeidillah. *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016
- Barton Greg. *Biografi Gus Dur (The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid)*, LkiS Yogyakarta, , PT. LkiS Printing Cemerlang. 2010.
- Efendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Fachruddin Ahmad, *Gus Dur dari Pesantren ke Istana Negara*, Yogyakarta: GAS, 1999.
- Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Hariyanto Sugeng. *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. 2002

- Hasan Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer (Konsep, Genealogi, dan Teori)*. Yogyakarta:SUKA-Pres. 2012.
- Hikam Muhammad. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia)*. Jakarta: KOMPAS. 1999.
- Hoesen Ibrahim .”Fikih Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik”. *Jurnal Ulumul Qur’an*, No.2 Vol. IV (1993), hal. 58. Lihat, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Iqbal , Muhammad, M.AG. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jurdi Fatahullah. *Sejarah Politik Indonesia Modern Kajian Politik, Politik Islam, Pemerintahan, Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Yogyakarta: CALPULIS. 2016.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i, *Studi tentang Peraturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Mahfud MD. *Islam, Politik, dan Kebangsaan*, LkiS Yogyakarta, PT.

LkiS Printing Cemerlang. 2010.

Malik. A. Haramain, *Gus Dur Militer dan Politik*(pengantar Prof. Dr.

Moh. Mahfud MD), Yogyakarta: LkiS, tahun, 2004

Mufti, Muslim, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: CV

Pustaka Setia, 2015.

Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur (Analisis Wacana Lritis)*,

Yogyakarta: LkiS, 2010.

Musa, Ali Masykur, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta,

Penerbit: Erlangga. Tahun 2010.

Nursahin. Moch. *Masa Depan Partai Islam di Indonesia Studi tentang*

Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya.

Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2016

Nusrati, Ali Ashghar. *Sistem Politik Islam*. Jakarta:Nur Al-Huda,

2015.

Qodir Zuly, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan*

Demokrasi di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Ridwan Nur Khalik. *NU dan Bangsa (1914-2010) Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. Cetakan III. 2016
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.
- Sjadzail Munawar. *Islam dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta: UI-Press. 1990.
- Suaedy, Ahmad, *Gila Gus Dur (wacana Pembaca Abdurrahman Wahid)*, Yogyakarta: LkiS, 2010
- Suntana Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Syamsudin Nur, Fiqih Siyasah, *(Sejarah, Pemikiran dan teori Politik Islam)*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya: 2015
- Thaba Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thoha Zainal Arifin, *Kenyelenehan Gus Dur (Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan)*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Ummatin Khoiro. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2002.

Wahid Abdurrahman. *Islam, Negara, dan Demokrasi Himpunan
Percikan Perenungan Gus Dur*. Jakarta, ERLANGGA. 1999

Wahid Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama
Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: Tha Wahid Institute.
2006.

Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta:
LkiS, 1999.

Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta:
LkiS, 1999.

Wahid, Marzuki, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum
Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Widayati , Heni Wahyu, *Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara
di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan*, Jurnal Dakwah, Vol, X
No. 2, Juli-Desember, 2009.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Musa Soim
Tempat & Tanggal Lahir : Boyolali. 07, Febuari, 1995
NIM : 132211050
Alamat Rumah : Jl. Makmur No. 15, Rt: 02\Rw:
01, Desa. Bangkok, Kec.
Karanggede, Kab. Boyolali
Nomor HP : 0838383 62162 / 085 727 030 140

Pendidikan Formal :

1. MI Al-Ma'arif, Bangkok, Karanggede, Boyolali, lulus tahun 2007
2. MTs N Wonosegoro, Boyolali, lulus tahun 2010
3. SMA N 1 Karanggede, Boyolali, lulus tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum , angkatan 2013

Semarang, 07 Desember 2017

Penulis,

MUSA SOIM
NIM: 132211050